

Analisis K.A.P (Knowledge, Attitude, Practices) APP / APL di Kota Ambon

Januari 2016

Studi Akhir untuk

Program Mentorship

MAMPU
Maju Perempuan Indonesia
untuk Penanggulangan Kemiskinan



**Australian
Aid** 

Januari 2016

Pelaksanaan studi dengan menggunakan parameter K.A.P ini dijalankan untuk APP/APL Kota Ambon, Maluku sebagai bagian dari Program MAMPU yang dilaksanakan oleh BaKTI dengan dukungan Yayasan Arika Mahina, Kota Ambon sebagai mitra lokal. Kegiatan studi ini dilaksanakan oleh *Trias H.Utomo* dan *Danardono Siradjudin* sebagai konsultan.

Daftar Isi

Abstraksi	1
Bab I. Catatan Umum	2
Bab II. Catatan Pelaksanaan	3
1. Metodologi.....	3
2. Pemilihan Sampel	4
3. Rekam Proses	4
Bab III. Catatan Analisis Individu	5
1. APP/APL	5
a. Muhammad Asmin M (Ketua Komisi I/ Fraksi Kebangkitan)	5
b. Mourits Librecht Tamaela (Sekretaris Komisi I/ Ketua Fraksi Nasdem)	8
c. Elly Toisutta S.Sos (Wakil Keua Komisi III/ Fraksi Golkar).....	12
d. Juliana Pattipeilohy (Anggota Komisi II/ PKPI)	15
e. Marcus Pattiapon (Anggota Komisi II/Ketua Fraksi Golkar)	17
f. Astrid Yully Soplantula (Anngota DPRD Komisi III/ Fraksi Gerindra).....	20
g. Rustam Latupono (Wakil Ketua DPRD/ Fraksi Gerindra).....	22
h. Christianto Laturiuw, S.E (Wakil Ketua Komisi II/ Fraksi Gerindra)	26
i. Toha Abu Bakar (Anggota DPRD Komisi II/ Fraksi PPP).....	28
j. Lenora E.K Far Far (Wakil Ketua Komisi I/ Fraksi PDIP)	31
k. Rovik Akbar Afifudin (Anggota DPRD Komisi III/ Ketua Fraksi PPP)	35
l. Muriany Dominggus (Anggota DPRD Komisi I/ Fraksi Demokrat).....	37
2. Perspektif Perwakilan SKPD	39
3. Perspektif Kelompok Konstituen	40
4. Perspektif Kelompok Media	42
Bab IV. Catatan Akhir	44
1. Kesimpulan	44
2. Rekomendasi	45
Lampiran	47
Klasifikasi Pertanyaan K.A.P (Knowledge, Attitute and Pratices)	477

Abstraksi

Studi ini adalah bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai kondisi akhir yang berkaitan dengan pengetahuan/knowledge, sikap/attitude dan praktek /practices (K.A.P) atas fungsi-fungsi keparlemenan serta isu-isu pemberdayaan perempuan terutama 5 fokus program MAMPU oleh APP/APL mitra.

Metode yang diterapkan dalam studi ini adalah kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam. Proses penilaian melalui *scoring* tidak dilakukan dengan pertimbangan bahwa informasi yang dihasilkan lebih pada potret diri masing-masing APP/APL mitra tanpa memberikan justifikasi baik atau buruk. Penilaian akan dilakukan nanti pada akhir program mentorship dalam studi akhir (*end-line study*) dengan membandingkan pernyataan atas pertanyaan yang sama secara substantif di masing-masing elemen (*qualitative comparative analysis*). Oleh karena itu, hasil pokok studi tahap ini adalah gambaran perubahan K.A.P masing-masing APP/APL di masing-masing isu. Beberapa APP/APL menunjukkan adanya perubahan yang signifikan bila dibandingkan pada saat *baseline study* (April 2015). Adanya perubahan ini tidak hanya karena kegiatan *mentorship* tetapi dimungkinkan juga karena semakin intensifnya APP/APL mitra program berinteraksi dengan *stakeholder* lain baik dengan anggota dewan yang lain, SKPD, media dan kelompok konstituen.

NO	DPRD KAB. AMBON	POSISI	STATUS
1	Muhammad Asmin M	Ketua Komisi I/Fraksi Kebangkitan	Baru
2	Mourits Librecht Tamaela*	Sekretaris Komisi I/Ketua Fraksi Nasdem	Baru
3	Elly Toisutta, S.Sos*	Wakil Ketua Komisi III/ Fraksi Golkar	Baru
4	Juliana Pattipeilohy	Anggota Komisi II/ PKPI	Petahana
5	Marcus Pattiapon	Anggota Komisi II/Ketua Fraksi Golkar	Petahana
6	Astrid Yully Soplantula	Anggota DPRD Komisi III/Fraksi Gerindra	Baru
7	Rustam Latupono*	Wakil Ketua DPRD/ Fraksi Gerindra	Petahana
8	Christianto Laturiuw, S.E*	Wakil Ketua Komisi II/Fraksi Gerindra	Baru
9	Toha Abu Bakar	Anggota DPRD Komisi II/Fraksi PPP	Baru
10	Lenora E K Far Far*	Wakil Ketua Komisi I/Fraksi PDIP	Baru
11	Rovik Akbar Afifudin*	Anggota DPRD Komisi III/Ketua Fraksi PPP	Petahana
12	Muriany Dominggus	Anggota DPRD Komisi I/Fraksi Demokrat	Petahana

*APP/APL dengan perubahan signifikan

Selain wawancara dengan APP/APL mitra, studi ini juga berupaya mendapatkan informasi secara berimbang dengan melakukan juga wawancara dengan perwakilan SKPD, kelompok konstituen serta kelompok media. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan konfirmasi atau verifikasi atas pernyataan yang telah didapat dari APP/APL sebelumnya.

Studi ini akan menyampaikan analisa perubahan setiap individu APP/APL mitra dan di bagian akhir akan menyampaikan kesimpulan secara umum menjelaskan bagaimana fungsi-fungsi keparlemenan termasuk fungsi representasi dan interaksi dengan stakeholder lain dijalankan oleh *Mentee*. Rekomendasi yang disampaikan adalah bersifat umum tidak dirinci untuk masing-masing APP/APL, dalam kaitan dengan materi dan metode *mentorship* dilaksanakan.

Bab I. Catatan Umum

BaKTI fokus pada Pendekatan Penguatan Parlemen dari Program MAMPU, yaitu bekerja sama dengan anggota parlemen; parlemen perempuan, kaukus perempuan, dan anggota parlemen laki-laki yang mendukung advokasi gender, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Program BaKTI-MAMPU adalah “**Memperjuangkan Kebijakan yang berpihak kepada Perempuan Miskin melalui Penguatan Parlemen, Kelompok Perempuan dan Civil Society**” yaitu:

1. Meningkatkan akses perempuan miskin kepada program perlindungan sosial.
2. Meningkatkan akses perempuan kepada pekerjaan dan menghilangkan diskriminasi di tempat kerja.
3. Memperbaiki untuk migrasi tenaga kerja perempuan ke luar negeri.
4. Memperkuat kepemimpinan perempuan dalam meningkatkan kesehatan ibu dan kesehatan reproduksi.
5. Memperkuat kepemimpinan perempuan dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan.

Saat ini sampai pada tahun ketiga program berjalan (Fase 1), BaKTI bekerja di 5 provinsi dan bekerjasama dengan mitra di daerah yaitu sub office BaKTI di Nusa Tenggara Barat mencakup Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Timur. Di Sulawesi Selatan yaitu LPP Bone di kabupaten Bone, LP2EM Parepare di kota Parepare, YKS di Kabupaten Tana Toraja dan MAUPE di kabupaten Maros. Kemudian dengan RPS Sultra di Kota Kendari (Sulawesi Tenggara), Arika Mahina di kota Ambon (Maluku) dan PPSE-KA di kabupaten Belu.

Secara khusus, program Mentorship ini dilakukan secara piloting pada 2 kabupaten/kota yaitu kota Ambon di Maluku dan kabupaten Bone di Sulawesi Selatan. Hasil yang diharapkan adalah APP/APL lebih peka terhadap isu gender karena memiliki pemahaman yang lebih jelas atas peran mereka dan memiliki kecakapan untuk memajukan, membela, dan terlibat dalam proses menuju realisasi aspirasi konstituen mereka, terutama kaum miskin dan mempercepat reformasi di tingkat kebijakan yang terkait dengan 5 tema tersebut. Penguatan kapasitas ini melalui pelatihan, *mentoring*, studi banding dan metode lain tentang tupoksi (legislasi, gender budgeting dan pengawasan), pemahaman peraturan yang terkait tupoksi, *public speaking*, penguatan perspektif mengenai tema MAMPU beserta peraturan terkait.

Sebagai upaya melihat perubahan anggota parlemen dari sisi pengetahuan, sikap dan perilaku serta praktek-praktek dalam fungsi keparlemenannya maka studi K.A.P ini dilakukan sebagai basis awal (*baseline*) memahami anggota parlemen sebagai mitra program. Oleh karena untuk melihat sebuah perubahan, maka studi akhir ini (*endline*) dilakukan setelah program penguatan kapasitas APP/APL dilaksanakan. Hasil analisa perubahan APP/APL mitra ini diharapkan akan dapat digunakan sebagai salah satu input dalam penyusunan strategi program *mentorship* paska *pilot project* yang melibatkan APP/APL lebih luas sebagai mitra.

Secara umum, APP/APL peserta program mentorship mengalami peningkatan pemahaman dalam fungsi keparlemenan. Namun dalam termuan lapangan, yang

lebih menonjol dirasakan adalah bagaimana anggota DPRD dan juga kelompok konstituen, dibantu untuk saling berkomunikasi dan bekerja sama satu sama lain. Bahkan, **Sekretaris Dewan** mengatakan jika dialog dan diskusi antara anggota DPRD dan masyarakat adalah tradisi baru. Sebelumnya, biasanya masyarakat datang ke gedung DPRD dengan cara demonstrasi.

Bab II. Catatan Pelaksanaan

1. Metodologi

Sebagai bagian dari program *mentorship*, maka instrumen analisis ini dibangun dalam rangka melihat perubahan individu APP/APL mitra dimana telah dipahami bahwa unsur suatu perubahan adalah adanya pengetahuan yang mampu memberikan keyakinan dan motivasi untuk bersikap serta berperilaku seperti yang diharapkan. Dalam praktek, perubahan ini pun akan juga dipengaruhi oleh adanya sarana yang menunjang serta berlakunya norma atau kebijakan yang memungkinkan adanya perubahan yang lebih baik.

Dengan pertimbangan tersebut maka parameter K.A.P (*Knowledge, Attitude and Practices*) dipilih sebagai basis analisis memahami kapasitas individu APP/APL mitra. Pendekatan ini nantinya akan dilaksanakan ulang di akhir program sebagai pembandingan dengan pendekatan *Qualitative Comparative Analysis* (QCA) untuk melihat perubahan selama kurang lebih 8 bulan pelaksanaan kegiatan mentorship. Data berupa tanggapan para mitra tidak dimasukkan ke dalam skala dengan pertimbangan bahwa **pengetahuan** (*knowledge*) tidak bisa dijenjangkan, untuk **sikap** (*attitude*) ketika dikemas ke dalam skala maka jawaban narasumber akan cenderung normatif dan untuk **praktek** (*practices*) akan dikonfirmasi sumber verifikasinya. Oleh karena itu, perbandingan nantinya akan melihat apakah ada perbedaan pernyataan secara substansi atas pertanyaan yang sama paska *mentorship*.

Untuk mendukung strategi pembelajaran orang dewasa (*andragogy*) yang menonjolkan kesetaraan peran, konsep diri (*self-determination & self-direction*) serta materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan atas peran sosial peserta maka studi ini tidak dalam tujuan untuk memberikan penilaian (skor) individu tetapi lebih untuk melihat perubahan mitra program mentorship dihubungkan dengan kinerjanya sebagai APP/APL.

Dengan mengacu pada penjelasan di atas, maka studi ini dilaksanakan untuk membandingkan jawaban sehingga dapat mengidentifikasi perubahan sebelum dan sesudah pendampingan berkaitan dengan pertanyaan:

- a) Bagaimana pengetahuan, sikap dan praktek atas fungsi keparlemenan dan pemberdayaan perempuan yang dimiliki oleh APP/APL?
- b) Bagaimana perwakilan SKPD, kelompok komunitas dan media melihat pengetahuan, sikap dan praktek atas fungsi keparlemenan dan pemberdayaan perempuan yang dimiliki oleh APP/APL ?

2. Pemilihan Sampel

Rancangan studi ini adalah melibatkan 24 orang sebagai narasumber dengan rincian 12 orang sebagai APP/APL mitra, 2 orang dari LSM, 2 orang dari media, 5 orang dari kelompok konstituen dan 3 orang dari SKPD setempat.

Pemilihan narasumber yang terlibat dalam studi ini telah dilakukan oleh BaKTI dan Yayasan Arika Mahina sebagai lembaga mitra lokal dengan menggunakan metode *quota sampling*.

Pemilihan dengan menggunakan pola ini adalah lebih karena pertimbangan efektivitas pencapaian tujuan program. Pemilihan dilakukan dengan kriteria bahwa APP/APL yang dilibatkan adalah orang-orang yang telah aktif berpartisipasi sebelumnya di program MAMPU dengan harapan pada teknis pelaksanaannya nanti tidak akan menemui kesulitan untuk membangun komitmen terutama ketika menyepakati rencana tindak lanjut proram *mentorship*.

3. Rekam Proses

Kegiatan wawancara dengan para narasumber dilakukan pada tanggal 17-21 Desember 2015. Proses wawancara rata-rata membutuhkan waktu lebih dari 1 jam, terutama untuk APP/APL. Terdapat 4 nama narasumber yang belum dapat ditemui pada saat rentang waktu pelaksanaan wawancara, dan disepakati akan dilaksanakan oleh mitra lokal, Yayasan Arika Mahina. Meskipun pada saat wawancara sudah mendapatkan 9 narasumber APP/APL, namun narasumber 1 orang dari anggota DPRD Kota Ambon ternyata tidak menjadi informan saat baseline, maka hasil wawancara tidak dianalisis.

Tantangan yang muncul dalam proses menggali informasi terutama dengan APP/APL adalah waktu yang sangat pendek, mengingat jadwal yang tidak pas antara kedatangan interviewer dengan anggota DPRD Kota Ambon. Padahal, rata-rata wawancara dengan APP/APL membutuhkan waktu 1 jam untuk 1 orang narasumber.

Bab III. Catatan Analisis Individu

Dalam bagian ini akan disampaikan pernyataan para APP/APL berikut sumber verifikasi berupa pernyataan yang bersangkutan. Dari pernyataan tersebut, di akhir bab ini akan disampaikan bagaimana kelompok *stakeholder* lain memandang kinerja parlemen daerah secara umum.

1. APP/APL

a. Muhammad Asmin M (Ketua Komisi I/ Fraksi Kebangkitan)

- *Pemahaman, Sikap dan Praktek Keparlemenan*

Perubahan yang tampak dalam fungsi legislasi bahwa saat ini *Mentee* telah terlibat dalam proses penetapan Perda yang dibahas bersama pemerintah. Dengan pertimbangan masalah yang akan diselesaikan dalam perda adalah persoalan yang menyentuh masyarakat.

Untuk fungsi pengawasan, *Mentee* juga telah mampu menjelaskan bahwa pengawasan terkait dengan pengawasan anggaran dan pengawasan pelaksanaan pembangunan adalah implementasi representasi masyarakat. Sehingga fungsi pengawasan haruslah dijalankan dalam rangka memastikan bahwa pemerintah menjalankan program pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.

April 2015	Januari 2016
<i>“Kita kan baru 4 bulan, jadi soal penyusunan perda belum ada. Sementara ini kita baru selesai dengan Bamus dimana ada 1 perda inisiatif dari DPRD dan 2 perda yang direncanakan dari eksekutif”</i>	<i>“Saya paham bahwa menjalankan tiga fungsi DPRD, tujuan utamanya haruslah kepentingan masyarakat.”</i>

Perubahan yang muncul dalam penyerapan aspirasi masyarakat, dialog dengan konstituen sudah dilakukan, baik dalam reses maupun di luar reses. *Mentee* sudah melakukan interaksi rutin dengan konstituennya.

April 2015	Januari 2016
<i>“...untuk serap aspirasi masyarakat, kita langsung turun ke lapangan dalam proses yang sementara ini berjalan, kan sudah diagendakan, jadi kita tinggal turun”</i>	<i>“...Komunikasi anggota DPRD dengan masyarakat tidak terbatas pada masa reses saja. Setiap saat adalah reses. Bentuk komunikasi yang dilakukan anggota adaah langsung dan tidak langsung. Misalnya ada fenomena di masyarakat yang menuntut anggota dewan bergerak merespon ya segera</i>

	<i>dilakukan meski tanpa komunikasi terlebih dahulu dengan masyarakat secara langsung.”</i>
--	---

- **Relasi dengan Media**

Sejak awal, *Mentee* memahami peran ganda media dimana tidak hanya sebatas untuk menyampaikan informasi (*exposure*) kegiatan-kegiatan parlemen kepada masyarakat tetapi sekaligus dapat memberitakan keluhan kelompok masyarakat berkaitan kinerja pelayanan publik (*control*). Perubahannya adalah pada saat *baseline*, *Mentee* belum mampu menguraikan dengan rinci dan jelas bagaimana membina hubungan dengan media. Saat ini *Mentee* menjelaskan bahwa telah menjalin hubungan yang strategis dengan komunikasi intensif tidak membatasi jenis media baik cetak, elektronik maupun online.

April 2015	Januari 2016
<i>“buat kami komunikasi personal maupun dengan institusi media itu harus terbangun. Hal ini juga harus didasari dengan kemitraan yang baik sehingga media tersebut akan dapat menjadi bagian dari social control. ”</i>	<i>“kita sering bertukar informasi dengan teman-teman media. Itu cara yang menurut saya paling pas. Komunikasi intensif dan tidak menutup diri. Itu saja cara yang terbaik.”</i>

- **Pencapaian dalam Konteks 5 Tema Utama MAMPU**

Saat studi awal, *Mentee* menyatakan bahwa program-program yang ada saat ini belum secara khusus memberdayakan kaum perempuan. Kegiatan yang dilakukan lebih sebagai penanganan masalah saja, belum disusun sebagai upaya yang sistematis dalam meningkatkan kapasitas perempuan sehingga potensi munculnya suatu permasalahan dapat diminimalkan. Saat ini *Mentee* menyatakan program MAMPU sangat bermanfaat bagi anggota DPRD. Sebab dengan keterbatasan kemampuan anggota dewan, bekerjasama dengan program MAMPU akan sangat banyak membantu.

April 2015	Januari 2016
<u>Akses pekerjaan khusus perempuan dan penghapusan deskriminasi</u> <i>“kemarin sempet juga kami sampaikan bahwa ada satu perusahaan punya kasus. File kasusnya sebenarnya ada di teman-teman Arika bahwa ada pekerjaan pria yang dikerjakan oleh wanita sehingga perlu penyesuaian soal pembagian jam kerja ”</i>	<u>Akses pekerjaan khusus perempuan dan penghapusan deskriminasi</u> <i>“kemarin sempet juga kami sampaikan bahwa ada satu perusahaan punya kasus. File kasusnya sebenarnya ada di teman-teman Arika bahwa ada pekerjaan pria yang dikerjakan oleh wanita sehingga perlu penyesuaian soal pembagian jam kerja ”</i>
<u>Peningkatan kondisi tenaga kerja perempuan di luar negeri</u>	<u>Peningkatan kondisi tenaga kerja perempuan di luar negeri</u> <i>“...perlu peningkatan kapastitas bagi</i>

April 2015	Januari 2016
<p>“...kalau di Ambon sampai sekarang belum tercover soal TKW. Belum ada kasus-kasus orang Ambon yang menjadi korban TKW”</p> <p><u>Perbaikan kesehatan reproduksi bagi perempuan</u> “kebetulan kita bermitra dengan Dinas Kesehatan, anggaran soal itu kita kemarin mendorong dan rencana yang diusulkan tidak kita ganggu gugat jadi ya tidak ada masalah”.</p>	<p>buruh sebelum diberangkatkan. Sehingga tidak hanya mengirimkan pekerja dengan kemampuan menjadi pekerja rumah tangga”</p> <p><u>Perbaikan kesehatan reproduksi bagi perempuan</u> “saya kira perlu ditingkatkan sosialisasinya, agar semua perempuan memahami betul kesehatan reproduksi. Di sisi lain, perlu juga sosialisasi program pemerintah yang terkait hal ini”.</p>

- **Integrasi program dengan pihak lain**

Pada saat studi awal, *Mentee* menyatakan bahwa hubungan kerja dengan SKPD berbasis kebutuhan sesuai dengan temuan di lapangan. Interaksi lebih sebagai upaya penyelesaian masalah. Dengan kelompok masyarakat atau LSM, dari penjelasan *Mentee* tampak bahwa belum memiliki interaksi programatik yang luas dimana masih sebatas program dengan Yayasan Arika Mahina.

Pada saat studi akhir ini, *Mentee* menyatakan bahwa kerjasama secara formal, artinya tertulis secara pribadi memang belum pernah dilakukan. Namun secara kelembagaan, *Mentee* terlibat ketika DPRD kerjasama dengan Program MAMPU. Sementara dengan kelompok masyarakat atau LSM, dari penjelasan *Mentee* selama ini lebih banyak kerjasama informal dalam bentuk menerima aduan dari LSM mengenai berbagai hal.

April 2015	Januari 2016
<p>“kalau kemitraan itu bersifat fleksibel. Soal dengan SKPD tergantung permasalahan yang ditemukan di lapangan, kalau ada permasalahan kita panggil. Untuk LSM, kemarin kita ada MoU dengan temen-temen dari yayasan Arika Mahina”.</p>	<p>“Kalau kerjasama informal itu sering. Selama ini saya terbuka dengan teman-teman LSM. Informasi diserahkan oleh teman-teman LSM”.</p>

b. Mourits Librecht Tamaela (Sekretaris Komisi I/ Ketua Fraksi Nasdem)

• *Pemahaman, Sikap dan Praktek Keparlemenan*

Dalam kerangka fungsi legislasi, saat studi awal, *Mentee* belum mampu memberikan penjelasan secara jelas proses penyusunan suatu peraturan daerah secara runtut. Penjelasan yang menonjol adalah perbedaan inisiatif suatu peraturan yaitu antara dewan dan pihak eksekutif tanpa memerinci proses masing-masing. Saat studi akhir ini *Mentee* menyatakan ikut serta dalam pembahasan suatu peraturan daerah. *Mentee* menyatakan bahwa dalam hal pembuatan peraturan, lebih banyak mengejar target jumlah. Di lain sisi, proses mengesahkan dalam lembaran daerah masih terkatung-katung.

April 2015	Januari 2016
<i>"...semua perda akan kita bawa ke BPPD, sampai nanti diparipurnakan. Nah setelah itu maka dengan pertimbangan di paripurna maka akan ditetapkan sebagai perda inisiatif lalu proses-proses berlanjut."</i>	<i>"...misalnya, satu produk hukum kami buat, kita menunggu tahapan pengesahan dari Gubernur sampai ke Kementrian Dalam Negeri, sampai balik lagi menjadi produk hukum yang berkuatan hukum tetap, sangat lama. Sehingga implementasinya terkatung-katung"</i>

Pada saat studi awal, dalam hal fungsi pengawasan, *Mentee* telah paham pentingnya kunjungan ke lapangan tetapi belum dilaksanakan. Dari penjelasannya tampak bahwa belum melakukan koordinasi secara intensif dengan SKPD sebagai salah satu mekanisme klarifikasi temuan awal hasil pengawasan. Fungsi pengawasan lebih dimaknai sebagai proses audit atas suatu anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Perubahannya saat ini, *Mentee* menjelaskan bahwa DPRD Kota Ambon cukup proaktif dalam artian selalu melakukan tinjauan langsung ke lapangan, dimana lokasi implementasi program berada.

April 2015	Januari 2016
<i>"...kalau fungsi pengawasan dalam 4 bulan ini sampai sekarang masih bersifat indoor. Kita kemarin sudah melewati 2 tahapan yaitu tahapan pembahasan APBD perubahan 2014 dan pembahasan APBD murni tahun 2015. Kita menjalankan fungsi pengawasan itu dalam artian mata-mata anggaran atau program yang kami anggap layak dan harus didukung, itulah fungsi pengawasan menurut kami..."</i>	<i>"...kami selalu langsung check ke instansi, ke lapangan, ke wilayah-wilayah dimana realisasi anggaran berada. Kami mengagendakan waktu-waktu dan deadline dalam melakukan check lapangan..."</i>

Hal senada juga muncul ketika diskusi mengenai fungsi penganggaran. *Mentee* menjelaskan masih secara umum terutama di bagian akhir dari rangkaian panjang proses penganggaran, belum sampai dengan pengayaan substansi sehingga mampu membahas setiap satuan dalam mata anggaran. Selain belum mengemuka bagaimana menguatkan konsep dengan diskusi teknis bersama pihak lain misal dengan akademisi, *Mentee* juga belum memberikan perhatian pada partisipasi masyarakat untuk menjangkau masukan. Perubahannya, kali ini *Mentee* mampu menjelaskan tahapan-tahapan pembahasan fungsi anggaran cukup detail. Mulai dari pembahasan Rencana Kerja Anggaran, Kebijakan Umum Anggaran, pembahasan di Komisi serta di Badan Anggaran, menurutnya berjalan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Menurut *Mentee*, saat ini, DPRD sedang terus belajar untuk lebih kritis melihat usulan anggaran pemerintah. *Mentee* juga menjelaskan soal target DPRD bersama dengan pemerintah kota Ambon adalah beralih dari status Wajar Dengan Pengecualian ke Wajar Tanpa Pengecualian.

April 2015	Januari 2016
<p><i>“jadi kebijakan anggaran sementara itu kita bahas di Badan Anggaran. Jadi dari KUA-PPAS dia ditetapkan menjadi plafon anggaran setelah itu dia di-breakdown dalam bentuk RKA, nah RKA itu berbasis komisi maka komisi bisa mengkritisi dengan mitra. Setelah itu dibawa ke bangkar lalu ke paripurna. Jadi seperti itu tahapannya”</i></p>	<p><i>“jadi fokus kami sekarang adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Prinsip itu yang mendasari pembicaraan kami dalam tahapan-tahapan pembahasan anggaran”</i></p>

Secara umum, dalam menjalankan tiga fungsi DPRD, *Mentee* melihat masih butuh peningkatan pengetahuan dan peningkatan kapasitas. Terutama hal-hal yang lebih teknis dan operasional. Khususnya dalam menjalankan fungsi anggaran dan legislasi.

- *Relasi dengan Media*

Mentee menyatakan hal yang kurang lebih sama dengan konsepsi yang diungkapkan saat baseline, yaitu peran media selain menyebarkan informasi kegiatan-kegiatan parlemen kepada masyarakat tetapi sekaligus juga dapat memberitakan keluhan masyarakat sebagai masukan untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah. Sekaligus sebagai alat kontrol terhadap kerja parlemen.

Namun demikian, *Mentee* masih cenderung menyatakan rencana dari model hubungan dengan media, salah satu yang akan dilakukan adalah coffee morning secara rutin. Diakui *Mentee*, rencana tersebut masih belum bisa berjalan karena kesibukan.

Berkaitan dengan media yang dianggap strategis, *Mentee* menerangkan bahwa media yang mempunyai kompetensi, yaitu media yang bekerja

dengan standar jurnalistik yang jelas dan resmi berbadan hukum, terdaftar di dewan pers.

Pemahaman mengenai tipe-tipe media sudah lengkap. *Mentee* menyebutkan banyak tipe media yang sudah digunakan baik *mainstream* maupun alternatif seperti media sosial.

April 2015	Januari 2016
<p><i>“Hampir rata-rata semua media sudah kita gunakan bahkan media dari pusat seperti Elshinta juga ada dan respon mereka baik kalau kami kadang seara personal menyampaikan apa yang kami temui di lapangan, apa yang kami kerjakan. Media-media sosial juga kita pergunakan ”</i></p>	<p><i>“Media adalah pilar keempat dari pembangunan. Eksekutif, legislatif tanpa media adalah hampa. Media berperan sebagai penyeimbang antara eksekutif dan legislatif”</i></p>

- **Pencapaian dalam Konteks 5 Tema Utama MAMPU**

Pada saat studi awal, secara umum *Mentee* menyatakan bahwa program-program yang ada saat ini belum secara spesifik memberdayakan kaum perempuan. Kegiatan yang dilakukan lebih bersifat “pemadam kebakaran” dimana lebih berorientasi pada penyelesaian masalah.

Pada saat studi akhir ini, menurut *Mentee* paling tidak sudah berkontribusi setidaknya dalam 2 Peraturan Daerah, yaitu Perda tentang HIV/Aids dan Perda perlindungan perempuan dan anak. Namun demikian, *Mentee* tidak menjelaskan secara rinci, masing-masing isu dalam konteks program MAMPU.

April 2015	Januari 2016
<p><u>Akses perempuan pada program perlindungan sosial</u> <i>“...walaupun selama ini tidak terlalu besar kesenjangannya namun kami tetap harus melakukan cross-check data-data penerima yang masuk di meja kami....”</i></p> <p><u>Akses pekerjaan khusus perempuan dan penghapusan deskriminasi</u> <i>“pernah ada kasus soal pembagian jam kerja. Satu perusahaan harus bisa memberikan ruang kepada tenaga kerja yang sedang hamil harus diberikan kompensasi wktu istirahat yang cukup. Kasus yang kami temui di swalayan ACC ada ibu hamil sudah 7 bulan dan masih kerja kemudian kita perintahkan kepa perusahaan untuk memberikan waktu istirahat”</i></p>	<p><i>“...dalam konteks perjuangan perempuan, saya sudah menghasilkan 2 Peraturan Daerah, yaitu Perda tentang perlindungan HIV/Aids serta Perda perlindungan perempuan dan anak.”</i></p>

April 2015	Januari 2016
<p><u>Peningkatan kondisi tenaga kerja perempuan di luar negeri</u> <i>“...tidak ada biro TKW di Ambon, mungkin mereka seara personal lewat Jawa. Saya pikir yang banyak ya..kerja lokal di Indonesia kalau di luar neeri sepertinya minim.”</i></p> <p><u>Pengurangan kekerasan dan perbaikan kesehatan reproduksi bagi perempuan</u> <i>“...DPRD kota Ambon mengeluarkan perda HIV/AIDS itu bagian dari kita punya respon terhadap perempuan. Kalau kasus kekerasan dalam rumah tangga kita melakukan pengawasan intens dengan NGO”.</i></p>	

- *Integrasi program dengan pihak lain*

Pada saat studi awal, *Mentee* menyatakan belum memaksimalkan hubungan kerja dengan SKPD terutama mitra komisi. *Mentee* juga menyampaikan perlunya kesepakatan bersama yang melibatkan multi pihak baik dari sisi legislatif, eksekutif dengan melibatkan akademisi, LSM termasuk media. Pelibatan ini diharapkan mampu dikemas secara formal dalam bentuk perjanjian kerja sama.

Perubahannya, kali ini *Mentee* menyatakan selama ini melakukan kerjasama program pemberdayaan, kerjasama dengan SKPD terkait. Misalnya program untuk kelompok usaha ataupun kelompok kekaryaannya atau karang taruna.

April 2015	Januari 2016
<p><i>“Kita juga dalam pengusulan pembahasan peraturan daerah yang nantinya memastikan untuk melibatkan NGO-NGO atau praktisi yang ada untuk menuliskan naskah akademik. Memang harus ada MoU yang lebih antara SKPD atau pemerintah termasuk dengan media-media ntuk kemudian juga menjamin akses informasi publik”</i></p>	<p><i>“Kita singsingkan kepentingan, bersama-sama bekerja bersama untuk masyarakat di dapil meski berbeda-beda partai politik...harus saling bekerja sama mulai dengan pemerintah sampai dengan kelompok-kelompok masyarakat termasuk LSM”</i></p>

c. Elly Toisutta S.Sos (Wakil Keua Komisi III/ Fraksi Golkar)

- *Pemahaman, Sikap dan Praktek Keparlemenan*

Dalam fungsi legislasi, *Mentee* sudah mampu memberikan penjelasan bagaimana fungsi legislasi harus dijalankan, mulai dari naskah akademik, *legal drafting*, prolegda serta tata cara pembuatan peraturan daerah. Namun belum menyampaikan proses penyusunan perda secara lengkap dan terperinci. Penjelasan seperti ini berbeda jauh saat awal masuk sebagai anggota parlemen yang belum tahu sama sekali proses legislasi.

Dalam kerangka fungsi lain, yaitu pengawasan, *Mentee* masih menjelaskan lebih pada pengawasan atas program-program pemerintah (eksekutif) terutama infrastruktur dengan memerinci konsekuensi tindak lanjut terhadap SKPD sebagai mitra kerja bila ada temuan. *Mentee* menjelaskan bahwa fungsi pengawasan harus dimulai sejak saat perencanaan pembangunan, sehingga saat akhir program, akan lebih mengetahui apa yang harus diawasi.

Untuk fungsi anggaran, *Mentee* mengaku belum pernah masuk di badan anggaran, tetapi sebagai anggota parlemen, dituntut tahu semua hal. Baginya, fungsi anggaran adalah komitmen bersama antara pemerintah dan parlemen untuk menjalankan rencana pembangunan.

April 2015	Januari 2016
“... <i>khusus kita perempuan karena memang rata-rata masih baru sehingga belum punya pengalaman, hemat saya yang saya rasakan sebenarnya perlu penguatan kapasitas artinya pengetahuan perlu ditambah tidak sebatas sektor tertentu, misalnya bagaimana proses penyusunan prolegda</i> ”	“.... saat ini lebih tau, jika hendak membuat atau merancang peraturan perundangan, tahu memulainya dari mana.”

Sejak awal, *Mentee* menyebutkan telah berinteraksi dengan masyarakat secara intensif dalam rangka mendapatkan masukan sehingga mampu menjalankan fungsi-fungsinya. *Mentee* menyebutkan interaksi dengan masyarakat dilakukan secara intensif minimal sebulan sekali dengan cara bertatap muka langsung. Jika tidak bisa dilakukan, biasanya sekedar SMS atau komunikasi lewat telepon.

April 2015	Januari 2016
“... <i>saya mempunyai sebuah yayasan yang mengelol kepentingan masyarakat dimana kemudian kita memiliki kelompok-kelompok binaan, bagaimana mereka bisa mendapatkan penghasilan yang baik, bagaimana</i> ”	“ <i>Karena basis pemilih saya adalah beragama Kristen, maka salam hari minggu selalu saya lakukan. Sekedar menyampaikan salam hari minggu, semoga Tuhan memberkati, sehingga hubungan dengan konstituen setidaknya terjaga</i> ”

<i>memanage keuangan sehingga nantinya akan meningkatkan kesejahteraannya”</i>	
--	--

- **Relasi dengan Media**

Mentee menyadari peran media memang penting baik untuk menyampaikan informasi kegiatan-kegiatan parlemen kepada masyarakat maupun sebaliknya pemberitaan tentang keluhan kelompok masyarakat. Dalam prakteknya sampai saat ini belum ada pendekatan khusus. sebab ada kesepakatan bahwa hubungan dengan media menjadi prioritas pimpinan komisi. Di luar itu, penyampaian anggota ke media adalah atas nama fraksi. Karena *Mentee* duduk sebagai pimpinan Komisi III, akses ke media memang lebih terbuka. Selama ini *Mentee* lebih banyak menggunakan media; koran, radio, TVRI. Terutama media yang nge post di kantor DPRD.

Secara pribadi, penyusunan strategi berhubungan dengan media memang masih menjadi rencana, meski sudah pernah mendapatkan coaching tentang hubungan dengan media.

April 2015	Januari 2016
<i>“...pribadi saya itu merasa belum nyaman berhubungan dengan media. Saya harus tahu mereka datan dari Koran mana, mereka bekerja dari sisi yang mana. Banyak yang hanya sekedar datang wawancara kemudian nggak tahu ujung pangkalnya besok itu keluar di koran apa nggak”</i>	<i>“...Biasanya kalau saya punya berita, saya panggil mereka (wartawan) ke ruangan. Ini loh, ibu ingin ngomong ini. Dan biasanya besok sudah jadi berita”</i>

- **Pencapaian dalam Konteks 5 Tema Utama MAMPU**

Dalam konteks pencapaian program-program pemerintah yang ada saat ini dalam kaitan tema utama program MAMPU, secara ideal *Mentee* kesulitan memformulasikan dalam bentuk gagasan. Namun dalam pelaksanaan atas fungsi parlemen, *Mentee* mampu menyebutkan beberapa contoh agenda aksi, kecuali dalam kaitan isu pekerja migran yang memang menjadi masalah minor di Kota Ambon.

April 2015	Januari 2016
<u>Konteks akses perempuan dalam proram perlindungan sosial</u> <i>“...nah melihat dari sosialisasi-sosialisasi saya ke bawah itu, ternyata informasi program-program oleh pemerintah sangat minim sehingga masyarakat tidak tau kalau ada program seperti itu”</i>	<u>Konteks akses perempuan dalam program perlindungan sosial</u> <i>“...Saya melihat masyarakat belum menyadari pentingnya ikut program perlindungan sosial. Saya selalu melakukan upaya penyadaran ini, baik membantu langsung ketika ada korban maupun saat bertemu konstituen. Saya berharap teman-teman anggota Dewan yang lain juga</i>

April 2015	Januari 2016
<p><u>Peningkatan kondisi tenaga kerja perempuan di luar negeri</u> “...masalah TKW,ya..saya tidak melihat ada lembaga resmi yang khusus menangani masalah TKW. Jadi kalau orang Ambon mau ke luar negeri itu melalui agen-agen tersendiri dia tidak ada agen resmi”</p> <p><u>Perbaikan kesehatan reproduksi bagi perempuan</u> “...kalau layanan reproduksi khusus perempuan ini saya elihat ada satu hal penting yan menjadi PR adalah penyebaran informasinya. Banyak ibu-ibu yang masih bingungapa itu kanker serviks, kanker payudara misalnya...dan kemudian bagaimana penegahan dan penanganannya”.</p> <p><u>Pengurangan kekerasan terhadap perempuan</u> “...seenarnya masih banyak kasus kekerasan, tetapi masalahnya adalah tidak melaporkannya entah karena malu atau takut...”</p> <p><u>Akses pekerjaan khusus perempuan dan penghapusan deskriminasi</u> “perlu wadah untuk sosialisasi lebih baik untuk mendampingi perempuan misalnya denan membentuk semacam forum atau serikat pekerja perempuan.”</p>	<p><i>melakukan hal yang sama”</i></p> <p><u>Peningkatan kondisi tenaga kerja perempuan di luar negeri</u> “...Masalah di sektor ini memang tidak terlalu menonjol”</p> <p><u>Perbaikan kesehatan reproduksi bagi perempuan</u> “...ini isu yang sangat penting. Saya merencanakan melakukan pemeriksaan gratis,bersama MAMPU, pendeteksian dini kanker serviks di beberapa kecamatan. Saya sudah bekerjasama dengan dinas kesehatan untuk dapat membantu APP turun langsung ke desa untuk melakukan pelayanan gratis pendeteksian dini kanker rahim. ”</p> <p><u>Pengurangan kekerasan terhadap perempuan</u> “...seenarnya masih banyak kasus kekerasan, tetapi masalahnya adalah tidak melaporkannya entah karena malu atau takut...”</p> <p><u>Akses pekerjaan khusus perempuan dan penghapusan deskriminasi</u> “perlu kerjasama semua pihak untuk terus mengkampanye kan anti diskriminasi di semua sektor.”</p>

- **Integrasi program dengan pihak lain**

Sampai saat ini, *Mentee* menyatakan bahwa belum optimal bekerja sama dengan SKPD mitra. Pada saat studi awal, *Mentee* menyatakan bahwa hal ini dilatarbelakngi adanya kesenjangan pengetahuan terutama ketika pembahasan teknis di sektor-sektor tertentu. Pada saat studi akhir ini, *Mentee* menyebutkan bahwa kepala SKPD laki-laki lebih terbuka dan lebih menerima gagasan perubahan dari parlemen.

Sementara untuk kerjasama dengan LSM, *Mentee* menyebutkan bahwa saat ini sudah ada kerjasama yang dilakukan namun lebih berorientasi pada suatu masalah yang muncul di masyarakat sehingga lebih berperan sebagai mediator.

April 2015	Januari 2016
<p>“...saya pribadi merasa belum terlalu punya banyak masukan. Saya masih butuh pendampingan seara teknis, seara mater-materi yan harus dibawa dalam perdebatan dengan SKPD. Untuk NGO, saya pribadi hanya baru dengan Arika Mahina, kalau ada kelompok lain saya pikir lebih membantu”.</p>	<p>“...saya selama ini menjadi lebih berfungsi sebagai mediator, misalnya ada penderita HIV di satu desa, tapi dia malu mengungkapkannya, saya menghubungi yayasan yang bergerak untuk isu itu. Tolong itu ada penderita di desa itu, tolong dibantu. Jadi lebih ya...sekarang ini peran saya lebih seperti itu ”.</p>

d. Juliana Pattipeilohy (Anggota Komisi II/ PKPI)

- *Pemahaman, Sikap dan Praktek Keparlemenan*

Pada saat studi awal, pemahaman *Mentee* mengenai fungsi-fungsi parlemen masih sedikit rancu, belum memberikan penjelasan yang jelas dan terperinci bagaimana pelaksanaan masing-masing fungsi.

Saat ini, *Mentee* mengenai fungsi legislasi, masih belum memberikan penjelasan yang jelas bagaimana pelaksanaan fungsinya sebagai APP. Untuk fungsi anggaran, *Mentee* berpendapat DPRD menetapkan anggaran yang akan digunakan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal fungsi pengawasan, *Mentee* memaknainya dengan pengawasan penggunaan anggaran. Menurut *Mentee* fungsi pengawasan juga bertujuan untuk memastikan pemerataan pembangunan dilakukan di semua wilayah dalam dapilnya.

April 2015	Januari 2016
<p>“Fungsi saya sebaai anggota legislasi yaitu pengawasan terhadap pemerintah kota khususnya mitra kerja komisi 2 yang berikutnya tugas membuat perda untuk kepentingan masyarakat. Fungsi penawasan sekarang ini khusus untuk meningkatkan PAD. Kita kan komisi 2 berkaitan dengan pajak, keuangan jadi pengawasan kita sekarang ini akan diadakan evaluasi triwulan”.</p>	<p>“Dari ketiga fungsi DPRD, ketiganya sangat penting. Fungsi anggaran penting, fungsi pengawasan juga tidak kalah pentingnya. Demikian juga dengan fungsi legislasi. Bagaimana masyarakat bisa teratur jika tidak ada peraturan yang harus ditaati”.</p>

Dalam hal upaya menyerap aspirasi masyarakat, dialog dengan konstituen sudah dilakukan sejak awal. Sampai saat ini, *Mentee* lebih sering melakukan hubungan dengan konstituen pada saat reses untuk berinteraksi langsung dengan konstituen. Hal ini dilakukan untuk menangkap secara langsung apa

yang menjadi aspirasi masyarakat. Sehingga tanggungjawab untuk memperjuangkan di parlemen akan lebih kuat.

April 2015	Januari 2016
“...kita dalam bentuk reses. Kita bertemu konstituen di dapil kita untuk tahu apa-apa masukan dari masyarakat”.	“...kita dalam bentuk reses. Kita bertemu konstituen di dapil kita untuk tahu apa-apa masukan dari masyarakat”.

- **Relasi dengan Media**

Pada saat studi awal, *Mentee* memaknai peran media sebatas untuk menyampaikan informasi kegiatan-kegiatan program pembangunan kepada masyarakat belum melihat media juga dapat menyampaikan keluhan kelompok masyarakat sebaai masukan peningkatan kinerja pelayanan publik.

Pada saat studi akhir ini, *Mentee* memaknai hubungan dengan media itu penting. Tetapi *Mentee* juga pendapat bahwa media juga sering melakukan salah pemberitaan, sehingga membuat enggan berhubungan dengan media. Selain itu, sebagai anggota dewan yang tidak menjabat sebagai pimpinan, *Mentee* jarang berinteraksi dengan media. Jika dibandingkan dengan anggota dewan yang menjabat sebagai pimpinan komisi atau fraksi. Namun demikian, dalam beberapa kali sempat berhubungan dengan media cetak dan TVRI.

April 2015	Januari 2016
“kalau saya sih kurang sama media, saya jarang sama mereka. Saya jarang berkomentar, misalnya walikota punya kebijakan, kalau mewan itu baik ya...nggak usah dikomentari. Media cukup memberitakannya saja agar masyarakat lebih tahu”.	“Saya rasa media penting, tapi kadang-kadang media salah, lain memberitakan apa saya ungkapkan, sehingga saya malas berhubungan dengan media”.

- **Pencapaian dalam Konteks 5 Tema Utama MAMPU**

Secara umum pernyataan *Mentee* masih sama dimana menyatakan bahwa untuk program-program pemberdayaan perempuan terutama dalam hal 5 tema utama MAMPU, *Mentee* tidak begitu mengikuti perkembangannya. Namun perubahannya adalah saat ini *Mentee* sudah berusaha untuk mendapatkan informasi. Hal ini tampak dari kemampuan menjawab ketika ditanyakan lebih mendalam untuk beberapa-beberapa isu utama

April 2015	Januari 2016
“Terus terang kalau untuk proram MAMPU ini saya ngak pernah ikut, karena kemarin memang waktu kegiatan-kegiatan kan saya PAW 8 bulan, tapi udah masa-masa terakhir, saya sibuk rapat-rapat keluar daerah jadi saya nggak sempat ngikutin	“Terus terang kalau untuk program MAMPU ini saya dari komisi II jarang bersinggungan langsung dengan isu-isu yang menjadi konsentrasi MAMPU”. <u>Akses pekerjaan khusus perempuan dan penghapusan deskriminasi</u>

April 2015	Januari 2016
<p><i>program Arika Mahina”.</i></p>	<p>“...sebenarnya sudah banyak program bantuan masyarakat. Meskipun tidak khusus untuk perempuan, tetapi bisa dimanfaatkan oleh perempuan. Salah satunya adalah bantuan KUBE (Kredit usaha bersama) serta ada program dari Dinas Koperasi dalam bentuk bantuan dana bergulir, tanpa dipungut bunga.”</p> <p><u>Perbaikan kesehatan reproduksi bagi perempuan</u></p> <p>“.... ada program dari dinas kesehatan, dengan kegiatan melakukan pemeriksaan kanker servik gratis.”</p>

- *Integrasi program dengan pihak lain*

Pada saat studi awal, *Mentee* juga menyatakan bawa selama ini hubungan kerja dengan SKPD sebatas mitra kerja komisi tempat dimana *Mentee* ditempatkan dan untuk berinteraksi dengan LSM, *Mentee* tidak memiliki rencana untuk bekerjasama sama.

Perubahan pada saat studi akhir ini, *Mentee* menyatakan selama ini berhubungan dengan Arika Mahina, yang bisa menjembatani hubungan dengan masyarakat.

April 2015	Januari 2016
<p>“ya..kerjasama dengan SKPD paling sama mitra saja, kalau sama LSM saya nggak pernah.”</p>	<p>“ya..kerjasama dengan SKPD paling sama mitra saja, kalau sama LSM saya baru kerjasama dengan Arika Mahina. Dengan Arika, saya dibantu berhubungan dengan masyarakat. Masyarakat jadi lebih mengenal kita, dan tidak segan-segan berhubungan dengan kita”</p>

e. **Marcus Pattiapon (Anggota Komisi II/Ketua Fraksi Golkar)**

- *Pemahaman, Sikap dan Praktek Keparlemenan*

Dalam fungsi legislasi, pada saat studi awal, *Mentee* belum mampu memberikan penjelasan secara jelas proses penyusunan suatu peraturan daerah. Penjelasan masih sangat umum tidak muncul penjelasan misalnya bagaimana penyusunan naskah akademik atau mekanisme konsultasi publik untuk mendiskusikan suatu ranperda.

Perubahannya, saat ini *Mentee* mampu menjelaskan secara jelas proses penyusunan suatu peraturan daerah walaupun penjelasan kurang terperinci.

Tidak muncul penjelasan misalnya bagaimana penyusunan naskah akademik atau mekanisme konsultasi publik untuk mendiskusikan suatu ranperda.

April 2015	Januari 2016
<p>“...untuk tahapan legislasi kita ikut ketentuan mekanisme dalam MD3. Misalnya perda inisiatif, kita di komisi biasa bagi pansus berbasis komisi. Lalu komisi menarik persoalan yang kemudian diangkat menjadi ranperda sesuai kebutuhan...”</p>	<p>“...fungsi legislasi itu adalah fungsi dimana dewan bertugas membuat peraturan daerah...mulai dari menyusun prioritas prolegda, adanya naskah akademik samapi dibahas di pansus”</p>

Dalam hal fungsi pengawasan dan penganggaran, secara umum *Mentee* belum terlihat perubahan. Dalam hal fungsi pengawasan artinya mengawasi segala bentuk kebijakan dan pelaksanaan program dari pemerintah. Dalam fungsi penganggaran, *Mentee* menyatakan bahwa fungsi ini memposisikan DPRD sebagai perencana sekaligus menetapkan APBD.

April 2015	Januari 2016
<p>“Selama 4 bulan ini yang sudah kita buat terkait dengan pengawasan sekaligus penganggaran, kita panggil SKPD terkait komisi 2 untuk evaluasi program tahun 2014 di sektor ekonomi peningkatan PAD karena kita sedang memaksa pemerintah untuk meningkatkan PAD karena memang sangat minim. Hal ini juga diarahkan untuk membahas surat-surat masuk terkait keluhan masyarakat”.</p>	<p>“menjalankan fungsi pengawasan artinya mengarahkan dewan dalam mengawasi segala bentuk kebijakan dan pelaksanaan program dari pemerintah, kalau penganggaran artinya memposisikan DPRD sebagai perencana sekaligus menetapkan APBD.”</p>

Dalam hal upaya menyerap aspirasi masyarakat tampak masih sama, *Mentee* menyadari bahwa perlu untuk sering mengadakan kunjungan lapangan ke konstituen untuk menyerap aspirasi. Dialog dengan konstituen sudah dilakukan baik dalam konteks reses maupun non-reses, tetapi masih belum terlihat bagaimana masukan dari kunjungan ke kelompok-kelompok konstituen secara programatik ditindak lanjuti terutama untuk sektor-sektor di luar komisi yang bersangkutan. Perubahan yang muncul adalah dari sisi intensitas berinteraksi dengan kelompok-kelompok masyarakat sebagai konstituen.

April 2015	Januari 2016
<p>“.... yang menjadi persoalan itu jika aspirasi mereka tidak terwujud. Contohnya adalah ketika kunjungan ada aspirasi masyarakat untuk buat jalan dan akhirnya tidak jadi”</p>	<p>“.... membangun komunikasi dengan konstituen itu dilakukan secara rutin tiap hari. Tidak terbatas pada saat reses saja. Saat ada acara sosialisasi misalnya. Ada ruang-ruang yang secara formal disediakan oleh pemerintah tetapi ada ruang-ruang yang diciptakan sendiri oleh anggota.”</p>

- *Relasi dengan Media*

Sejak awal *Mentee* menyadari peran media memang penting baik untuk menyampaikan informasi kegiatan-kegiatan parlemen kepada masyarakat maupun sebaliknya juga dapat berfungsi sebagai kontrol yaitu melalui pemberitaan tentang keluhan kelompok masyarakat

Strategi membangun relasi dengan media, *Mentee* menjelaskan hanya menjaga komunikasi secara intens dan langsung dengan media, dengan menggunakan teknologi komunikasi yang ada. *Mentee* menegaskan bahwa strategi yang selama ini digunakan adalah berkawan baik dengan media. *Mentee* juga menyatakan bahwa selama ini masih fokus hanya media *mainstream*, baik cetak maupun elektronik dan online, belum mengoptimalkan media-media alternatif seperti blog atau media sosial.

April 2015	Januari 2016
<p><i>“Karena kita tidak pernah menutup diri dari media, memang kita perlu media center. Ada masyarakat yang memiliki kemampuan menulis ada yang tidak, persoalannya tidak disitu tetapi mereka tidak bisa mengkomunikasikan kita di DPR. Sebenarnya bisa juga menggunakan media sosial tetapi saya kurang dalam penggunaannya sebagai pendukung kerja”.</i></p>	<p><i>“kami sebenarnya sangat berharap hadirnya media yang bebas dari kepentingan-kepentingan, menjunjung tinggi etika jurnalistik, sebagai penyambung lidah dengan masyarakat. Kita butuh hadirnya media-media yang seperti itu”.</i></p>

- *Pencapaian dalam Konteks 5 Tema Utama MAMPU*

Secara umum *Mentee* memandang bahwa pemberdayaan perempuan masih relevan terus dilakukan. Dalam pengamatan *Mentee*, masih banyak perempuan tergantung kepada suaminya, khususnya kota Ambon. Oleh karena itu, program pemberdayaan, peningkatan kemampuan bagi perempuan sangat lah penting dan perlu terus diupayakan.

April 2015	Januari 2016
<p><i>“saya kebetulan di 5 tahun terakhir tidak ada di komisi 1 dan komisi 1 yang membidangi hal-hal tersebut”.</i></p>	<p><u><i>Untuk akses perempuan ke dunia kerja.</i></u> <i>“...hal yang perlu dilakukan adalah menghilangkan budaya minder. Kemudian meningkatkan kemampuan dan keahlian mereka”.</i></p> <p><u><i>Untuk pekerja perempuan pekerja luar negeri</i></u> <i>“...dengan adanya MEA, saya sangat prihatin jika persaingan tidak dapat diantisipasi. Saya tidak sepakat jika pekerja perempuan dari Ambon hanya menjadi pekerja kasar, pembantu rumah</i></p>

April 2015	Januari 2016
	<p><i>tangga.”</i></p> <p><i>Untuk isu kesehatan reproduksi perempuan</i></p> <p><i>“program-program bidan desa itu sangat penting. Terutama untuk desa yang terpencil. Saya juga berharap pemanfaatan teknologi informasi dapat mengefektifkan sosialisasi program pemerintah yang ada.”</i></p>

- *Integrasi program dengan pihak lain*

Mentee menjelaskan saat ini kerjasama untuk membangun daerah pemilihan dilakukan bersama berbagai pihak. Salah satunya dengan LSM. Meskipun demikian, *Mentee* tidak menjelaskan secara rinci bagaimana kerjasama dilakukan.

April 2015	Januari 2016
<p><i>“saya pernah melakukan mediasi konflik dengan langsung turun ke lapangan bersama sama gubernur dan anggota DPR-RI ke kampung-kampung namun tetap saja tidak terselesaikan....”</i></p>	<p><i>“.... dapil saya itu termasuk daerah yang terbelakang. Entah karena faktor geografis atau jarak. Orang asli pulau di dapil saya, tetapi kemudian terpinggirkan. Nah saya butuh banyak media untuk dapat bisa mengangkat harkat dan martabat masyarakat setempat. Banyak juga LSM-LSM yang menawarkan kerjasama atau saya yang mengajak LSM-LSM itu bekerjasama.”</i></p>

f. **Astrid Yully Soplantula (Anngota DPRD Komisi III/ Fraksi Gerindra)**

- *Pemahaman, Sikap dan Praktek Keparlemenan*

Bila dibandingkan dengan studi awal, pernyataan *Mentee* masih belum menunjukkan perubahan. Penjelasan *Mentee* mengenai proses penyusunan peraturan daerah sangat umum, belum menjelaskan secara rinci bagaimana tahapan penyusunan suatau peraturan daerah. Penjelasan lebih bersifat normatif dimana menyampaikan bahwa pada prinsipnya suatu peraturan harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks fungsi pengawasan, *Mentee* menjelaskan pengawasan dalam hal implementasi anggaran dan kebijakan pemerintah.

Untuk fungsi penganggaran, *Mentee* menjelaskan secara umum bagaimana fungsi penganggaran dewan, yakni merencanakan dan menetapkan alokasi anggaran yang diusulkan oleh pemerintah.

April 2015	Januari 2016
<p>“...kalau dari fungsi pengawasan dan legislasi memang masyarakat sudah memandang itu sebagai proses internal kita di dewan, tetapi kalau mengenai penanganannya sulit karena masyarakat masih memandang bahwa artinya nanti kalau kita datang pasti akan bawa proyek, akan bawa duit”.</p>	<p>“...selama ini menurut saya, berjalannya fungsi-fungsi di DPRD, khususnya untuk anggota DPRD perempuan, sudah banyak peningkatan, terutama setelah mengikuti banyak kegiatan peningkatan kapasitas”.</p>

- **Relasi dengan Media**

Mentee menjelaskan pentingnya peran media sebatas menyampaikan informasi kegiatan-kegiatan parlemen kepada masyarakat belum sebagai salah satu instrumen untuk menerima masukan dari masyarakat dalam rangka peningkatan kinerja. Dari penjelasan Mentee tampak masih belum aktif membina hubungan dengan jurnalis, artinya media yang kemudian aktif mewawancarai yang bersangkutan.

April 2015	Januari 2016
<p>“...sejauh ini saya hanya sebatas wawancara dengan media yang bertugas di DPRD. Saya kebanyakan di Ambon Express dan Maluku Ekspos. Untuk media lain seperti radio belum kalau elektronik kebetulan sudah ada permintaan dari TVRI Ambon”.</p>	<p>“...saya pernah diwawancarai dengan media yang ada di dewan. Untuk media lain seperti radio, biasanya RRI, kalau elektronik TVRI Ambon” yang lain paling Ambon Express dan Maluku Ekspos..</p>

- **Pencapaian dalam Konteks 5 Tema Utama MAMPU**

Bila dibandingkan, maka tampak belum ada perubahan. Sejak awal Mentee menyatakan bahwa program-program pemberdayaan perempuan seharusnya tidak hanya ditujukan kepada kaum perempuan saja tetapi juga pada laki-laki. Penjelasan Mentee masih sangat umum. Namun demikian, hal lain yang muncul adalah Mentee menyebutkan dua perda yang berhubungan dengan perempuan, yaitu perda tentang perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan serta perda tentang perlindungan HIV/Aids dimana Mentee memandang sebagai salah satu pencapaian dalam memperjuangkan isu-isu dalam program MAMPU.

April 2015	Januari 2016
<p><u>Pengurangan tindak kekerasan kepada perempuan</u> “...ini kita anggota DPRD melihat dari 5 tema itu yang paling dominan adalah KDRT. Titik beratnya itu pada egoisme diri kita dan pasangan kita. Kalau untuk apa yang kita bisa lakukan kendalanya kita juga butuh informasi. Berap perempuan yang mengalami</p>	<p><u>Pengurangan tindak kekerasan kepada perempuan</u> “...ini kita anggota DPRD melihat dari 5 tema itu yang paling dominan adalah KDRT. Masih banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang kita lihat dalam setahun ini. Perlu kerjasama lebih keras dengan pihak-pihak yang bersangkutan....”</p>

April 2015	Januari 2016
<p><i>KDRT di Ambon, kalau Bakti sudah punya tolong kasih ke kita....”</i></p> <p><u>Akses pekerjaan khusus perempuan dan penghapusan deskriminasi</u> <i>“saya itu punya rencana untuk kaum ibu bisa menghasilkan income untuk keluarga. Saya inin punya kayak kelompok-kelompok usaha, kayak home industry itu”.</i></p> <p><u>Perbaikan kesehatan reproduksi bagi perempuan</u> <i>“setahu kita di Ambon sini pelayanan kesehatan juga belum memadai, buktinya banyaknya tingkat kmatian ibu hamil, anak bayi yang baru lahir. Hal ini lebih karena tenaga-tenaga medis di puskesmas itu kurang skill”.</i></p>	<p><u>Akses pekerjaan khusus perempuan dan penghapusan deskriminasi</u> <i>“saya kira program-program pemerintah untuk hal ini sudah mulai banyak, misalnya KUBE. Tugas kita adalah membantu sosialisasi, agar masyarakat luas mengetahuinya.”</i></p> <p><u>Perbaikan kesehatan reproduksi bagi perempuan</u> <i>“Saat ini Dinas Kesehatan sudah membuat program-program untuk pemeriksaan dini kanker serviks. Kita perlu mendorong agar masyarakat memanfaatkan program-program seperti ini”.</i></p>

- **Integrasi program dengan pihak lain**

Mentee menyatakan selama ini hubungan kerja dengan SKPD hanya terbatas pada mitra utama komisi dimana Mentee ditempatkan. Sedangkan kerjasama dengan LSM, masih terbatas melalui program MAMPU, dengan Arika Mahina.

April 2015	Januari 2016
<p><i>“kalau untuk eksekutif itu kan sebagai mitra komisi aja, kalau untuk media kita belum ada buat kesepakatan. Kalau tokoh-tokoh masyarakat kita kan sekedar interaksi denan merea, jadi sejauh ini belaum ada ikatan kerjasama apa-apa”.</i></p>	<p><i>“...hubungan dengan SKPD paling sama SKPD mitra komisi kalo LSM selama ini, ya...sama Arika Mahina”.</i></p>

g. Rustam Latupono (Wakil Ketua DPRD/ Fraksi Gerindra)

- **Pemahaman, Sikap dan Praktek Keparlemenan**

Menurut Mentee saat ini dalam menjalankan fungsinya para anggota DPRD kota Ambon, sudah ada peningkatan. Adanya peningkatan kapasitas anggota DPRD ini terutama yang terlibat dalam program MAMPU. Meski belum terlihat signifikan perubahan tersebut, tetapi terasa ada kemajuan dalam menjalankan fungsi DPRD.

Dalam fungsi legislasi, Mentee menjelaskan bahwa tahapan legislasi sudah mulai tertata, berbeda pada saat *baseline* dimana penjelasan Mentee sangat tidak lengkap. Perubahan tersebut misalnya ketika Mentee mampu

menjelaskan bahwa penetapan Prolegda prioritas tahunan dilakukan sebelum penetapan APBD. Anggota DPRD Kota Ambon juga sudah mampu memilah kebutuhan prioritas peraturan yang dibutuhkan.

Dalam menjalankan fungsi anggaran, *Mentee* melihat ada peningkatan berjalannya fungsi anggaran DPRD sekaligus fungsi pengawasan, dengan dibuktikan adanya peningkatan PAD dibanding tahun-tahun sebelumnya.

April 2015	Januari 2016
<p><i>“Saya kira kerja DPRD di fungsi (leislasi) ini sudah sesuai dengan aturan UU MD3 yang sudah direvisi. Selama masa transisi ini kita belum menghasilkan perda. Kita sepakat ada 9 buah ranperda dalam masa sidang satu. Ada satu yang saya kira terkait isu MAMPU yaitu penanggulangan HIV/AIDS yang merupakan inisiatif DPRD dari teman-teman komisi I.”</i></p>	<p><i>“Saya kira kerja DPRD Kota Ambon sudah mulai ada peningkatan. Hal ini disebabkan adanya peningkatan kapasitas teman-teman anggota dewan.”</i></p>

Dalam hal upaya menyerap aspirasi masyarakat, perubahan yang tampak adalah dari sisi intensitas dialog dengan konstituen sudah dilakukan baik di masa reses maupun non reses. Sejak awal *Mentee* sadar bahwa seorang anggota parlemen hendaknya memahami kepentingan konstituen tidak terbatas hanya pada sektor-sektor dalam komisi dimana dia bekerja. Namun demikian, *Mentee* masih belum mampu menjelaskan kerangka programatik berinteraksi dengan konstituen. Misalnya, adanya laporan balik mengenai perkembangan isu agar masyarakat tahu bagaimana perkembangan masukan mereka yang telah disampaikan pada kunjungan sebelumnya.

April 2015	Januari 2016
<p><i>“...intinya komunikasi tidak hanya dilakukan pada masa reses. Nomor telepon saya juga saya kasih ke konstituen agar nantinya bila mereka punya masukan dapat langsung disampaikan. Saya rasa cukup efektif, hamper setiap minggu kita diundang walaupun dalam non formal misalnya acara hajatan</i></p>	<p><i>“...ibaratnya, kita ini kan reses setiap hari. Tidak di kantor, di rumah, di kantor partai. Setiap saat bertemu dengan konstituen buat saya adalah pelaksanaan reses..”</i></p>

- **Relasi dengan Media**

Mentee menyadari peran media sangat penting untuk mensukseskan semua program yang ada di parlemen. Meskipun demikian, *Mentee* menganggap semuanya harus dikoordinasikan dengan baik di dalam lingkungan DPRD, sebelum menyampaikan ke media. Sebab, bagaimanapun juga media memiliki agenda nya sendiri.

Sedangkan dalam hal jenis media, *Mentee* masih fokus menggunakan media-media mainstream. Meski semua jenis media telah digunakan, baik cetak, elektronik, broadcast maupun online.

April 2015	Januari 2016
<p>“Biasanya di DPR sini ada penugasan dari media untuk meliput kegiatan DPR. Tapi juga ada pola pendekatan saya berkomunikasi dengan semua media. Banyak, mulai dari media cetak, ada juga dari TVRI, RRI juga. RRI kadang liputan langsung, TVRI juga kadang ada talkshow ketika ada isu hangat di masyarakat”.</p>	<p>“Ya kita berkomunikasi sebagai teman, sebagai saudara. Tapi kadang kala juga menjaga jarak dengan media. Sebab terlalu dekat dengan media juga kurang bagus, demikian juga jika terlalu jauh dengan media. Kurang bagus juga”.</p>

- **Pencapaian dalam Konteks 5 Tema Utama MAMPU**

Secara umum pernyataan *Mentee* tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan dalam *baseline*. *Mentee* menyatakan bahwa saat ini proram-program pemberdayaan kaum perempuan penting dilakukan, namun keterbatasan pemerintahan daerah menjadi kendala ketika tidak ada kontribusi dari pihak lain.

April 2015	Januari 2016
<p>“Saya kira isu yang diangkat relevan dengan kondisi kekinian Ambon. Dengan kemampuan APBD yang masih terbatas ini memang terkadang tangan kita tidak sampai mengurus semua”.</p> <p><u>Akses pekerjaan khusus perempuan dan penghapusan deskriminasi</u> “sementara ini yang saya tahu tidak ada hal-hal yang menonjol terkait denan deskriminasi ini.”</p> <p><u>Konteks akses perempuan dalam program perlindungan sosial</u> “...terkadang data yang dipakai bertolak belakang, karena data yang dipakai kan data BPS padahal ada juga data yang diambil Bappeda yang sangat berbeda, saya kira itu yang perlu dibenahi”</p> <p><u>Perbaikan kesehatan reproduksi bagi perempuan</u> “...saya pikir kalau di Ambon sudah bagus karena indeks pembangunan</p>	<p>“Program-program pemberdayaan seperti ini harus terus didorong. Sebab bukan hanya untuk kepentingan perempuan saja, tetapi untuk kepentingan seluruh masyarakat di Kota Ambon.”</p> <p><u>Akses pekerjaan khusus perempuan dan penghapusan deskriminasi</u> “dalam konteks program pemberdayaan, saat ini pemerintah kota Ambon sudah melaksanakan program bantuan, khususnya untuk perempuan salah satunya lewat Program Koperasi Usaha Bersama (KUBE).”</p> <p><u>Konteks akses perempuan dalam program perlindungan sosial</u> “Saat ini yang dibutuhkan adalah sosialisasi yang meluas kepada masyarakat. Jangan sampai program bantuan untuk masyarakat hanya</p>

<p><i>manusia kita kan sudah di atas rata-rata nasional”.</i></p> <p><u>Pengurangan kekerasan terhadap perempuan</u> <i>“...terkait dengan kekerasan rumah tangga, kalau tidak salah memang ada perdanya juga yang akan kita rencanakan...”</i></p>	<p><i>diketahui oleh segelintir orang.”</i></p> <p><u>Perbaikan kesehatan reproduksi bagi perempuan</u> <i>“saya pikir saat ini adalah awal yang baik, sebab perda yang mendukung tentang isu kespro sudah disyahkan yaitu yang berkaitan dengan isu penanggulangan masalah HIV/Aids”</i></p> <p><u>Pengurangan kekerasan terhadap perempuan</u> <i>“...saat ini sudah perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan dalam rumah tangga.”</i></p>
--	--

- **Integrasi program dengan pihak lain**

Mentee sudah terbiasa melakukan kerjasama, bukan hanya dengan LSM, tetapi juga dengan kelompok-kelompok masyarakat termasuk kelompok adat. Sedangkan dengan perguruan tinggi, Mentee menjalin kerjasama dalam hal pembuatan naskah akademik dan raperda.

Sedangkan bekerja sama dengan SKPD, tampak belum ada perubahan yaitu lebih menggunakan model kerjasama melalui komisi tempat dimana Mentee ditempatkan.

April 2015	Januari 2016
<p><i>“Kita biasanya menoba berkomunikasi dengan teman-teman propinsi dan bila perlu bersama-sama teman SKPD memperjuangkan sampai Jakarta. Dengan NGO, mungkin bisa bekerja sama dalam peningkatan kapasitas karena kadang ada keterbatasan misalnya teman-teman itu tidak begitu paham alur anggaran dan bagaimana pengawasannya”.</i></p>	<p><i>“Kita ini biasanya kalau kerjasama, bukan hanya dengan LSM, tetapi dengan tokoh adat, tokoh masyarakat. Biasanya dalam bentuk kesepakatan program yang harus diperjuangkan dalam APBD”.</i></p>

h. Christianto Laturiuw, S.E (Wakil Ketua Komisi II/ Fraksi Gerindra)

- *Pemahaman, Sikap dan Praktek Keparlemenan*

Dalam menanggapi pertanyaan mengenai fungsi legislasi, *Mentee* masih belum tampak adanya perubahan. *Mentee* menjawab makna fungsi tersebut tetapi tidak menjawab secara terperinci tahapan pembuatan perda. *Mentee* hanya menjawab jika pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kota Ambon sudah berjalan cukup baik. Salah satunya perda-perda yang berfokus kepada perlindungan ekonomi masyarakat kota Ambon telah disahkan.

Dalam fungsi penganggaran, *Mentee* juga relatif bwlum berubah dengan lebih banyak mengupas postur anggaran Kota Ambon dimana lebih banyak tergantung kepada transfer dana perimbangan dan hanya 10 % dari total APBD yang bersumber kepada pendapatan asli daerah (PAD).

Perubahan tampak ketika menjawab pertanyaan seputaran fungsi pengawasan. *Mentee* menyatakan sudah melakukan keiatan bersama dengan SKPD terkait termasuk menyelenggarakan rapat kerja sebagai tahapan verifikasi temuan dari lapangan. Sesuatu yang masih bisa ditingkatkan adalah pelibatan public dalam proses pelaksanaan pengawasan (*citizen participation*).

April 2015	Januari 2016
<i>“Saya lihat pengawasan adalah titik yang terkadang terabaikan. Dalam realitanya orang kadang-kadang sulit membaca sebagai pengawasan utuh dari perencanaan, penetapan anggaran dan pelaksanaannya”.</i>	<i>“Kita tidak boleh melakukan pengawasan hanya fokus pada isu anggaran, tapi kita juga harus melakukan pengawasan pada kebijakan-kebijakan pemerintah Kota Ambon”.</i>

Upaya menyerap aspirasi masyarakat juga terlihat berubah signifikan. Dialog dengan konstituen lebih intens dilakukan dengan berbagai kelompok konstituen baik tukang becak, pegawai negeri, dokter dan sebagainya. *Mentee* berpendapat bahwa tugas anggota DPRD adalah membuktikan kepada pemilihnya dan masyarakat kota Ambon, bahwa mereka bekerja untuk masyarakatnya.

April 2015	Januari 2016
<i>“ya kemarin itu kunjungan ke konstituen kita di masa reses akhir Desember. Banyak diantara mereka sebetulnya perlu penjelasan apa sih yang disebut dengan anggota DPRD? Apa pekerjaan yang dilakukan anggota DPRD? Bagaimana sebenarnya tradisi-tradisi model kunjungan yang menjurus kebutuhan uang?”</i>	<i>“Fakta lain yang harus dieliminir adalah money politic. Menurut saya, bagaimana mungkin anggota DPRD yang duduk di gedung dewan akan memperjuangkan aspirasi masyarakat jika dipilih dengan transaksi uang?”</i>

- *Relasi dengan Media*

Sejak awal, *Mentee* menyatakan bahwa peran media sangat penting untuk membantu memonitor kerja-kerja yang dilakukan baik oleh eksekutif, maupun oleh legislatif. Ralatif juga belum ada perubahan dalam tataran praktek, dengan tetap melakukan upaya interaksi secara intensif dengan media dimana fokus pada media cetak dan hanya media mainstream belum menyentuh media-media alternatif.

April 2015	Januari 2016
<p><i>“bagi saya media ini justru yang menjadi pilar yang paling utama. Saya pernah juga panggil mereka untuk diskusi bersama. Teman-teman media juga harus paham yaitu apa sebetulnya yang dicoba dibikin oleh DPRD sehingga berita mereka ada muatan yang bermutu. Sementara ini saya cuman media koran saja”.</i></p>	<p><i>“Disini sudah pernah terjadi pemberitaan berdasarkan plintiran berita. Berita dengan topik, anggota DPRD hanya menghabiskan uang untuk tamasya. Saya kira ini juga tantangan bagaimana mendorong media menjadi wahana edukasi untuk publik”.</i></p>

- *Pencapaian dalam Konteks 5 Tema Utama MAMPU*

Secara umum masih belum tampak adanya perubahan. *Mentee* memandang bahwa pemberdayaan perempuan belum sebagai fokus yang harus dilaksanakan oleh semua pihak yang berkelanjutan. *Mentee* memandang bahwa penyelesaian persoalan-persoalan dalam tema MAMPU, membutuhkan ketegasan pimpinan, baik dari eksekutif maupun legislatif.

April 2015	Januari 2016
<p><u>Akses pekerjaan khusus perempuan dan penghapusan deskriminasi</u> <i>“...di dapil kita itu ada satu catatan yang menjadi riwayat perjuangan saya sampai saat ini adalah persoalan di Batu Gong soal PHK ribuan karyawan dimana paling banyak juga perempuan. Masalah itu kemudian sampai ke Mahkamah Agung, tapi saya nggak kerti putusannya seperti apa, kenapa akhirnya karyawan kalah”.</i></p> <p><u>Membuka akses perempuan kepada program perlindungan sosial</u> <i>“nah untuk isu inikebetulan pekerjaan moril teman-teman Komisi 1. Beberapa sinyal sudah saya sampaikan. Seperti kasus Batu Gong punya masalah di BPJS”</i></p>	<p><u>Akses pekerjaan khusus perempuan dan penghapusan deskriminasi</u> <i>“Harapannya, dengan Perda tentang dana bergulir, mulai ada penyelesaian masalah-masalah tentang peningkatan kesejahteraan termasuk perempuan”</i></p> <p><u>Membuka akses perempuan kepada program perlindungan sosial</u> <i>“Saat ini ya...masih bertumpu pada inisiatif anggota parlemen. Sebagai contoh, hasil musrenbang masih belum juga bisa diperjuangkan dalam bentuk program yang konkrit.”</i></p>

<u>Perbaikan kesehatan reproduksi bagi perempuan</u> <i>"...saya belum melihat di komisi-komisi lain tetapi yang bisa saya petik informasi dari Komisi 1 kalau ndak salah tentang HIV/AIDS".</i>	<u>Perbaikan kesehatan reproduksi bagi perempuan</u> <i>"Saya kira bagus sekarang kita sudah punya Perda ttg HIV/AIDS"</i>
---	---

- *Integrasi program dengan pihak lain*

Mentee menyatakan sudah membina hubungan kerja dengan SKPD terutama, perdagangan dan perindustrian sebagai mitra utama komisi. Dalam bidang koperasi misalnya, perlu di teliti secara serius, berapa koperasi yang ada di kota Ambon, berapa yang masih berjalan, berapa yang sudah tidak berjalan. Sehingga tujuan utama dari program-program tersebut dapat dicapai.

April 2015	Januari 2016
<i>"...saya sudah bekerja sama dengan SKPD. Saya kebetulan ada di komisi 2 jadi ya sebatas SKPD mitra. Saya sudah memberikan masukan ke teman-teman komisi lain misalnya soal Batu Gong ke komisi 1 yang kemudian merekalah yang akan bekerja dengan depnaker"</i>	<i>"Kemarin waktu penyusunan perda dana bergulir, fokus saya lebih kepada pengawasan verifikasinya. Siapa yang benar-benar bisa mendapatkan, termasuk juga sanksi bagi yang tidak mengembalikan dana. Tujuan akhirnya adalah agar masyarakat tidak sekedar mendapatkan dana bantuan, tetapi bisa memanfaatkan bantuan tersebut."</i>

i. Toha Abu Bakar (Anggota DPRD Komisi II/ Fraksi PPP)

- *Pemahaman, Sikap dan Praktek Keparlemenan*

Sejak studi awal, dalam fungsi legislasi, *Mentee* mampu memberikan penjelasan mengenai proses penyusunan suatu peraturan daerah secara lengkap dan terperinci. Termasuk proses pelibatan publik.

Dalam fungsi penganggaran, *Mentee* menjelaskan bahwa fungsi penganggaran dewan adalah menetapkan dari usulan anggaran yang diusulkan oleh pemerintah. Tugas DPRD adalah memilah mana yang urgent bagi kepentingan masyarakat. Demikian juga, mengusulkan program yang dianggap urgent bagi masyarakat ketika tidak masuk dalam usulan pemerintah.

Dalam Mengenai fungsi pengawasan, *Mentee* memaknai fungsi pengawasan dalam konteks monitoring pelaksanaan program pembangunan. Fungsi pengawasan ini dilakukan oleh *Mentee* melalui rapat-rapat kerja dengan SKPD terkait serta kunjungan kerja ke lapangan untuk merespon masukan dari masyarakat.

Mengenai relasi dengan konstituen sebagai refleksi fungsi representasi, Mentee menjelaskan bahwa pola relasi dengan konstituen yang dilakukannya tergantung kondisi. Saat reses, pola yang dilakukan adalah terjun langsung ke masyarakat untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas atas persoalan masyarakat. Selain reses secara perorangan, bersama Komisi dan Fraksi juga dilakukan.

April 2015	Januari 2016
<p>“...kebetulan juga baru kurang lebih jalan 4 bulan kita melakukan tugas, nah kita baru sekarang ini baru memasuki rapat kerja dan kunjungan. Nah itu rapat kerja dan kunjungan yang kita lakukan ini selain memang tugas kita itu juga untuk merespon laporan dari masyarakat baik itu disampaikan secara tertulis lewat pimpinan DPR maupun datang langsung di komisi, maupun disampaikan oleh lewat teman-teman, lalu kita godog di komisi, kita diskusikan bersama, kita perbincangkan bersama, setelah itu baru kita mengambil sikap, apakah itu kita melakukan tinjau lapangan atautkah kita langsung mengambil sikap mengundang mereka baik itu terlapor maupun yang dilaporkan”.</p>	<p>“...pada prinsipnya, fungsi anggaran DPRD adalah menetapkan anggaran yang diusulkan oleh pemerintah. Urgensi bagi kepentingan publik salah alat ukur kami untuk menilai satu program layak atau tidak. Sebaliknya, kami juga bisa mengusulkan satu program yang menurut kami urgent bagi masyarakat, tapi tidak masuk dalam usulan pemerintah”.</p>

- **Relasi dengan Media**

Dalam penjelasannya belum mengindikasikan sesuatu perubahan. Mentee memandang relasi dengan media sangat penting, peran media adalah memberitakan (*exposure*) kegiatan-kegiatan DPRD. Selain itu, melalui media DPRD mampu memahami apa yang terjadi di masyarakat. Mentee juga belum menjelaskan bagaimana strategi membina hubungan dengan media, hanya menjelaskan menjalin komunikasi dengan lebih intensif.

Sedikit perubahan adalah ketika Mentee menyebutkan bahwa sementara ini lebih fokus pada media cetak, RRI dan TVRI. Media-media yang disebut adalah yang sering dijumpai di DPRD

April 2015	Januari 2016
<p>“Saya kira media ini salah satu mitra yang sangat penting buat kerja-kerja kedewanan kita. Karena ada pekerjaan yang kita lakukan itu yang tidak diketahui oleh masyarakat itu secara keseluruhan, yang perlu harus diekspos, supaya publik lebih bisa mengetahui apa yang sebenarnya kita lakukan. Kita masih menggunakan media-media cetak,</p>	<p>“Saya kira media ini salah satu mitra yang sangat penting, sebab media berfungsi sebagai alat kontrol, sebagai alat komunikasi, baik untuk internal dewan maupun eksternal. Dari media kita jadi mengetahui persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, sehingga kita bisa sikapi secara langsung. Media juga alat untuk</p>

<i>selama ini selalu bersama kita untuk meliput kegiatan kita di lapangan baik di kedewanan, dan selalu mereka memberikan dan meminta informasi-informasi kita yang nantinya akan dipublikasi lewat media mereka.”</i>	<i>menginformasikan pelaksanaan tugas-tugas kedewanan kepada masyarakat luas”</i>
--	---

- **Pencapaian dalam Konteks 5 Tema Utama MAMPU**

Dalam studi akhir ini, hal utama yang perlu dilakukan oleh DPRD dalam konteks isu program MAMPU menurut *Mentee* adalah mensosialisasikan program-program yang terkait pemberdayaan. Sehingga masyarakat luas lebih banyak mengetahui. Bagaimanapun, menurut *Mentee*, SKPD mempunyai keterbatasan waktu dan tenaga untuk mensosialisasikan program-programnya.

April 2015	Januari 2016
<p><u>Aspek umum pemberdayaan perempuan</u> <i>“Nah kebetulan kita di komisi 2 itu lebih mengarah kepada keuangan dan pendapatan kota ini. Tentunya ada dinas yang juga punya akses kegiatannya kepada masyarakat langsung. Kami juga di dalam penganggaran itu kami selalu menyampaikan kepada mereka agar setiap penganggaran, pertama dinas koperasi dan indag, karena itu berada di mitra komisi kita, maka kita sampaikan bahwa setiap penganggaran harus selalu memperhatikan kepentingan perempuan”.</i></p>	<p><u>Aspek umum pemberdayaan perempuan</u> <i>“Untuk isu ini, beberapa dinas memiliki program-program yang berhubungan dengan pemberdayaan. Misalnya di Dinas Sosial memiliki program pelatihan bagi perempuan. Demikian juga ada program dari pemerintah pusat, misalnya program keluarga harapan. Selama ini saya lebih memfasilitasi antara kelompok miskin dengan SKPD yang memiliki program-program pemberdayaan.”</i></p>
<p><u>Akses pekerjaan khusus perempuan dan penghapusan deskriminasi</u> <i>“Koperasi ini kita mengarah bagaimana kita mendorong, kita dorong bagaimana untuk bisa membentuk koperasi perempuan, koperasi wanita, sebagaimana juga yang didengungkan oleh pemerintah pusat”.</i></p>	<p><u>Akses pekerjaan khusus perempuan dan penghapusan deskriminasi</u> <i>“Diskriminasi terjadi karena perempuan dianggap kurang mampu, keahliannya juga diragukan. Oleh karena itu, program peningkatan kemampuan bagi perempuan sangatlah penting”.</i></p>
<p><u>Perbaikan kesehatan reproduksi bagi perempuan</u> <i>“saya kira yang berhubungan adalah apa yang diusulkan teman-teman di komisi 1 yaitu pada periode ini mereka kejar untuk masa sidang 2015 ini untuk HIV AIDS itu kan salah satu untuk melindungi kaum perempuan”.</i></p>	<p><u>Pengurangan kekerasan terhadap perempuan</u> <i>“...menurut saya, kekerasan terhadap perempuan terjadi karena persoalan ekonomi. Itu faktor yang utama. Oleh karena itu saya kira pemerintah harus terus mengupayakan perbaikan ekonomi keluarga-keluarga miskin. Selama ini saya menghubungkan</i></p>

April 2015	Januari 2016
<p><u>Pengurangan kekerasan terhadap perempuan</u> “...kebetulan untuk isu KDRT ini kan saya tidak di komisi itu, bukan saya terlepas dari pendampingan kegiatan-kegiatan sosial tetapi juga kami juga mendampingi korban-korban tindak kekerasan itu. Karena kalau di kota itu salah satu program kementerian sosial itu dalam lingkungan kesehatan keluarga, LK3. Kebetulan saya tahun kemarin masuk dalam pengurus kota. Jadi memang banyak persoalan sih kalau di KDRT di kota ini”.</p>	<p>antara korban kekerasan dengan dinas sosial yang memiliki perangkat dan infrastruktur untuk menangani kasus-kasus seperti itu.”</p> <p><u>Peningkatan kondisi tenaga kerja perempuan di luar negeri</u> Pemerintah harus menyediakan bimbingan dan pelatihan, agar tidak dilecehkan di negeri tujuan.”</p>

- *Integrasi program dengan pihak lain*

Mentee juga menyatakan hal yang relative sama dengan pernyataannya saat studi awal yaitu bahwa penting memaksimalkan hubungan kerja dengan anggota dewan lain dan dengan SKPD terutama mitra untuk komisi yang bersangkutan. Selama ini Mentee adalah pihak yang diajak kerjasama, sekaligus yang mengajak kerjasama.

Dalam hal kerja sama dengan LSM atau kelompok masyarakat, Mentee menyatakan selama ini juga menjalin kerjasama dengan LSM dan kelompok masyarakat. Meski demikian, Mentee tidak menjelaskan secara rinci model kerjasama dengan LSM yang dilakukan.

j. Lenora E.K Far Far (Wakil Ketua Komisi I/ Fraksi PDIP)

- *Pemahaman, Sikap dan Praktek Keparlemenan*

Dalam fungsi legislasi, sejak awal Mentee sudah menunjukkan kemampuan menjelaskan proses penyusunan suatu peraturan daerah. Indikasi perubahan tampak dari kemampuan Mentee menjelaskan prioritas prolegda sampai dengan penyusunan naskah akademik Menurut Mentee, yang paling penting dalam fungsi legislasi adalah tanggungjawab anggota parlemen untuk membahas Perda. Parlemen dalam menjalankan fungsi legislasi ini adalah melalui Badan Legislasi, termasuk di dalamnya adalah menyusun Program Legislasi daerah.

April 2015	Januari 2016
<p>“badan pembuat peraturan daerah. Itu disini baru badan pembuat peraturan daerah itu mengkaji, mengkaji terus mengadakan rapat bersama dengan eksekutif dalam hal ini yang mengajukan rancangan pembuatan perda itu. Setelah</p>	<p>“Badan legislasi atau yang sekarang dikenal sebagai badan pembuat peraturan daerah mempunyai fungsi yang sangat penting, karena setiap tahun prolegda dibuat disetujui oleh badan legislasi ini. Semua usulan</p>

April 2015	Januari 2016
<i>itu barulah rapat dari badan legeslasi untuk menentukan bahwa mana yang diprioritaskan untuk menjadi program untuk tahun ini kami harus turun ke masyarakat untuk mensosialisasikan tentang perda tersebut”.</i>	<i>eksekutif maupun usulan perda inisiatif, akan digodok di badan legislasi ini”.</i>

Indikasi perubahan juga tampak dalam hal fungsi pengawasan. Saat studi akhir ini *Mentee* menjelaskan bahwa fungsi pengawasan terbagi dua. *Pertama* yang dijalankan oleh komisi, yaitu menjalankan pengawasan terhadap implementasi program-program yang didanai APBD atau APBN. *Kedua*, yang dilakukan oleh pribadi adalah pengawasan sejauh mana efektifitas pelaksanaan program-program tersebut.

April 2015	Januari 2016
<i>“Setelah kami menerima masukan, maka turun mengkroscek langsung di lapangan setelah itu kami mengadakan rapat kerja dengan dinas terkait dengan pelapor dalam hal ini untuk mendudukan aturan-aturan yang ada”.</i>	<i>“Pengawasan yang melekat pada pribadi anggota DPRD adalah ketika mendapati pelaksanaan program baik yang didanai oleh APBD/APBN tidak berjalan sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, anggota dapat membuat laporan atau melakukan teguran ”.</i>

Dalam hal upaya menyerap aspirasi masyarakat, belum tampak ada perubahan yang signifikan. Sejak awal *Mentee* menyadari bahwa perlu untuk sering melakukan kunjungan ke konstituen untuk menyerap aspirasi untuk dibawa ke dalam rapat-rapat kerja dewan. Dialog dengan konstituen sudah dilakukan baik dalam konteks reses maupun non-reses, namun belum terlihat bagaimana masukan dari kunjungan ke kelompok-kelompok konstituen secara programatik ditindak lanjuti terutama untuk sektor-sektor di luar komisi yang bersangkutan.

April 2015	Januari 2016
<i>“....Selain reses kami juga sebagai anggota DPRD juga mempunyai tugas sendiri-sendiri itu ada. Di lapangan misalnya, di tempat tinggal lingkungan, kalau memang ada isu-isu, sebagai individu yang ada anggota DPRD kota Ambon langsung merespon, turun ke lapangan dan melihat itu. Kalau memang itu bisa diselesaikan hari itu kita selesaikan, tapi kalau memang tidak bisa diselesaikan maka kita akan bawa ke komisi”.</i>	<i>“...kami ini sebagai anggota DPRD wajib merespon masukan dari masyarakat. Kalau memang ada isu di masyarakat langsung merespon, turun ke lapangan dan melihat bagaimana solisinya. Kalau memang itu bisa diselesaikan hari itu kita selesaikan, tapi kalau memang tidak bisa diselesaikan maka kita coba angkat ke komisi”.</i>

- *Relasi dengan Media*

Mentee menyadari peran media memang sangat penting. Karena media bisa membesarkan maupun mengecilkan peran anggota parlemen. Oleh karena itu komunikasi antara anggota parlemen dengan media harus dilakukan dengan baik.

Menurut *Mentee*, meski media di Ambon sudah bagus, tapi tetap harus jeli melihat ada media yang digemari oleh orang. Bagaimana caranya menjadi narasumber tetap di media seperti itu.

Perubahan yang tampak, dalam prakteknya *Mentee* menggunakan pendekatan komunikasi yang lebih intensif dan kerjasama dalam bentuk berbagi informasi ke media massa. Sedangkan dalam bentuknya, media yang sering di gunakan adalah RRI, TVRI dan hampir semua media cetak besar di Ambon.

April 2015	Januari 2016
<p>“.....kalau saya sih peran media itu sangat penting, karena dari media saya bisa menjadi besar. Justru itu kalau untuk saya itu menjalin komunikasi yang sangat baik dengan media. Tanpa media saya tidak dikenal oleh masyarakat, itu yang penting. Kalau yang sering berkomunikasi ada media elektronik, seperti yang sering ada di DPRD kota Ambon ini, kita media cetak banyak, elektronik seperti TVRI”.</p>	<p>“.....kalau kita berbicara di media, tetapi orang tidak ada yang membaca media tersebut, sama saja dengan membuang garam di laut. Ini yang harus secara jeli kita melihatnya. Menurut saya penting menjadi narasumber tetap di media yang digemari publik.”</p>

- *Pencapaian dalam Konteks 5 Tema Utama MAMPU*

Secara umum *Mentee* menyatakan bahwa proram-program yang ada saat ini butuh ada koordinasi dan kerjasama yang baik antara lembaga yang berkepentingan, agar bisa merealisasikan tujuan program-program ini.

Faktanya, sebagian besar masyarakat belum mengetahui adanya program-program yang ditujukan memberikan bantuan kepada masyarakat. Perubahan di tema ini yang tampak adalah peran *Mentee* dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat luas.

April 2015	Januari 2016
<p><u>Membuka akses perempuan kepada program perlindungan sosial</u> “Dari dinas kesehatan tidak pernah kan mensosialisasikan ke masyarakat tentang jaminan persalinan itu memang ada, sampai sekarang di kota Ambon itu, kita sering dari komisi I memarahi itu dinas</p>	<p><u>Membuka akses perempuan kepada program perlindungan sosial</u> “Tugas kami mensosialisasikan program-program yang ada di pemerintah, bak dari pemerintah kota Ambon maupun dari pemerintah pusat. Misalnya di dinas koperasi, ada</p>

April 2015	Januari 2016
<p>kesehatan. Kenapa kalian tidak pernah turun ke lapangan menyuarkan puskesmas untuk sosialisasi ke masyarakat.”</p> <p><u>Pengurangan kekerasan terhadap perempuan</u> “...kalau di Ambon memang banyak. Banyak kekerasan terjadi dalam hal ini, tapi karena memang tidak ada tempat. Kalau di tempat lain kan ada P2 TPA, tapi kan di sini belum. Otomatis mereka kan tidak tahu bahwa tempat mengadu mereka ke siapa. Akhirnya satu-satunya jalan mereka hanya mengadu langsung ke polisi”.</p> <p><u>Perbaikan kesehatan reproduksi bagi perempuan</u> “Jadi kalau untuk kesehatan reproduksi dalam hal ini terkadang masyarakat di kota Ambon itu kalau memang kalangan menengah ke atas mereka itu bisa mengetahui dengan benar, tapi kalau kalangan menengah ke bawah itu sangat sulit untuk mengetahui tentang kesehatan reproduksi.”</p>	<p>program KUBE. Sebab sebagian besar masyarakat masih belum mengetahui adanya program tersebut dan paham bagaimana mengakses program tersebut.”</p> <p><u>Pengurangan kekerasan terhadap perempuan</u> “...kalau di Ambon memang banyak. Banyak kekerasan terjadi dalam hal ini, tapi karena memang tidak ada tempat. Kalau di tempat lain kan ada P2 TPA, tapi kan di sini belum. Otomatis mereka kan tidak tahu bahwa tempat mengadu mereka ke siapa. Akhirnya satu-satunya jalan mereka hanya mengadu langsung ke polisi”.</p> <p><u>Perbaikan kesehatan reproduksi bagi perempuan</u> “Jadi kalau untuk kesehatan reproduksi dalam hal ini terkadang masyarakat di kota Ambon itu kalau memang kalangan menengah ke atas mereka itu bisa mengetahui dengan benar, tapi kalau kalangan menengah ke bawah itu sangat sulit untuk mengetahui tentang kesehatan reproduksi.”</p>

- *Integrasi program dengan pihak lain*

Perubahan dari tinjauan ini adalah dalam intensitas interaksi dengan SKPD walaupun masih sebatas sebagai mitra kerja lebih pada ruang lingkup komisi yang bersangkutan. Tidak muncul penjelasan, misalnya bagaimana *Mentee* membantu penyelesaian isu di luar sektor komisi yang bersangkutan.

Dalam wawancara, pernyataan *Mentee* mengenai kerja sama dengan LSM masih berkisar pada tataran pengetahuan dan sikap, belum memunculkan contoh-contoh praktek yang dijalankan selama ini dan bagaimana ke depan kecuali dengan Arika Mahina.

April 2015	Januari 2016
<p>“Kalau dengan SKPD ya.. kerjasamanya sebatas mitra komisi, untuk LSM, dengan Arika Mahina dalam hal ini dengan BaKTI baru beberapa waktu yang lalu saya kerjasama dengan kelompok konstituen.”</p>	<p>“Kalau dengan SKPD ya..kerjasamanya sebatas mitra komisi, untuk LSM, dengan Arika Mahina dalam hal ini dengan Bakti baru beberapa waktu yang lalu saya kerjasama dengan kelompok konstituen.”</p>

k. Rovik Akbar Afifudin (Anggota DPRD Komisi III/ Ketua Fraksi PPP)

• *Pemahaman, Sikap dan Praktek Keparlemenan*

Dalam menjelaskan fungsi-fungsi anggota dewan, Mentee mampu memberikan penjelasan berupa evaluasi pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut secara lengkap, baik fungsi legislasi, anggaran maupun pengawasan.

Untuk fungsi representasi yaitu bagaimana menyerap aspirasi masyarakat, dari penjelasan Mentee bahwa yang bersangkutan telah berinteraksi secara rutin dengan kelompok konstituennya. Hal yang masih bisa ditingkatkan adalah, intensitas ini dapat disertai penyusunan pola hubungan programatik yang terukur tujuannya.

April 2015	Januari 2016
<p><u>Fungsi Legislasi</u> “..ada perda inisiatif DPRD dan ada perda eksekutif. Perda eksekutif itu diusulkan dari eksekutif dimasukan ke BPPD lalu dibuat prolegdanya. Inisiatif DPRD sama, kita siapkan ramperdanya, kita usulkan ke paripurna. Kita biasanya mengusulkannya per komisi. Ketika komisi sudah memenuhi syarat kita usulkan menjadi sebuah perda setelah itu BPPD membahasnya kemudian membentuk pansus untuk menyelesaikan perda tersebut”.</p>	<p><u>Fungsi Legislasi</u> “..selama ini fungsi ini berjalan maksimal. Sebab kami mampu merampungkan 16 Ranperda. 6 diantaranya adalah raperda inisiatif DPRD. Menurut kami, 16 rampung dari 22 ranperda adalah gambaran maksimumnya fungsi ini”.</p>
<p><u>Fungsi Penganggaran</u> “...fungsi ini kan melekat pada setiap anggota DPRD maka dalam pembahasan anggaran kita mulai dari pembahasan PPAS di tingkat badan anggaran, setelah selesai kita bawa ke komisi yang membahas RKA dan program kerja lalu dikembalikan ke badan anggran kembali jangan sampai ada angka - angka yang melebihi plafon anggaran”.</p>	<p><u>Fungsi Penganggaran</u> “...untuk fungsi ini, DPRD Kota Ambon DPRD yang menetapkan APBD sebelum bulan desember artinya sesuai dengan aturan. Agar bisa menyesuaikan waktu pembahasan sesuai dengan ketentuan Kemendagri”.</p>
<p><u>Fungsi Pengawasan</u> “kita lakukan rapat evaluasi terhadap perda tahun sebelumnya, selain dari - surat masuk sebagai keluhan masyarakat atau kita pantau media massa. Lalu kita melakukan rapat koordinasi setelah itu kita turun ke lapangan melihat secara langsung problem yang dihadapi, setelah itu kita kembali dan membuat</p>	<p><u>Fungsi Pengawasan</u> “Fungsi pengawasan dilakukan oleh komisi. Berdasarkan fungsi pengawasan DPRD, sesuai dengan tugas kemitraan, kita merekomendasikan beberapa hal kepada pemerintah Kota Ambon; Badan Penyuluh Pertanian, Komisi AMDAL dan beberapa agenda yang kita rekomendasikan kepada pemerintah. Misalnya perencanaan anggaran</p>

April 2015	Januari 2016
<i>rekomendasi. Rekomendasinya disampaikan lewat paripurna.”</i>	<i>program besar, sebaiknya dilakukan pada tahun anggaran sebelumnya.”</i>

- **Relasi dengan Media**

Mentee menyadari peran media memang penting baik untuk menyampaikan informasi kegiatan-kegiatan parlemen kepada masyarakat. Menurut *Mentee* media merupakan anggota DPRD yang ke 36, membantu menjelaskan kepada publik apa yang sudah dikerjakan oleh parlemen.

Perubahan yang tampak pada relasi dengan media adalah *Mentee* saat ini menjalin komunikasi intensif dengan media, baik secara formal sebagai anggota parlemen maupun relasi pribadi sebagai teman.

April 2015	Januari 2016
<i>“Sangat penting, selain membantu kita menginformasikan apa yang kita lakukan di DPR sehingga jangan sampai masyarakat atau publik hanya mengira anggota DPRD hanya duduk saja. Kita sudah minta ke sekretariat untuk ada media center. Lalu setiap media yang masuk disini tidak kita batasi tapi kita dikasih ID card agartanggung jawab.”</i>	<i>“Membangun relasi media menurut saya sama dengan cara membangun relasi dengan civil society. Harus dilakukan secara intensif dan terus menerus. Sebab tanpa media, masyarakat tidak akan tahu apa yang saya kerjakan di parlemen.”</i>

- **Pencapaian dalam Konteks 5 Tema Utama MAMPU**

Dari penjelasan *Mentee* tampak belum banyak berubah bagaimana *Mentee* melihat 5 tema utama MAMPU ini. *Mentee* masih berpendapat bahwa pemberdayaan perempuan lebih sebagai suatu kegiatan program parsial yaitu hanya melekat mandatnya pada institusi-institusi tertentu. Pemberdayaan perempuan belum dimaknai sebagai sebuah gerakan sosial. *Mentee* juga masih berpendapat pencapaian dengan pengukuran kuantitatif seringkali tidak disertai peningkatan kualitas misal dalam hal kuota anggota parlemen perempuan.

April 2015	Januari 2016
<u>Konteks Pemberdayaan Perempuan secara Umum</u> <i>“di sini perempuan mendapatkan tempat yang baik dalam setiap aktifitas. Isu terkait dengan kesejahteraan perempuan, kemandirian perempuan terus mendapat porsi yang cukup di DPRD kota bahkan kita tahun ini ada 4 orang anggota DPRD perempuan”</i>	<u>Konteks Pemberdayaan Perempuan secara Umum</u> <i>“Program-program yang harus dilakukan adalah program-program yang membuat perempuan lebih berdaya, maju dan kuat serta program pemberdayaan. Di sisi lain, yang perlu dikuatkan adalah kepercayaan diri mereka. Untuk konteks Maluku, sepak terjang perempuan di pentas politik sudah luar biasa.”</i>

- *Integrasi program dengan pihak lain*

Mentee selama ini masih fokus menjalin kerjasama dengan memanfaatkan jalur partai serta relawan-relawan partai politik.

Mentee juga menyatakan belum ada LSM atau organisasi masyarakat yang bekerja sama dengan APP/APL dalam tema tertentu misal monitoring pelayanan publik. Selama ini hanya melalui program MAMPU saja, *Mentee* melakukan kerjasama di luar jalur tradisional partai politik yang selama ini dilakukannya.

April 2015	Januari 2016
“Bersama dinas kita belum pernah ada kerja sama khusus, kalau dengan konstituen setiap saat reses kan belum selesai reses. Setiap sabtu minggu biasanya kalau bisa selalu saya gunakan untuk bertemu dengan konstituen, taetapi sama, belum ada kemudian ada kerja sama tertentu.”	“Selama ini saya lebih menggunakan saluran relawan dan partai. Misalnya, masyarakat butuh air bersih, melalui APBD terlalu lama. Ya melalui bank saja mengajukan kredit. Sehingga menjadi kaplingan kita, bukan kaplingan APBD”

I. Muriany Dominggus (Anggota DPRD Komisi I/ Fraksi Demokrat)

- *Pemahaman, Sikap dan Praktek Keparlemenan*

Perbandingan antara pernyataan dalam *baseline* dan *endline* belum tampak adanya perubahan yang signifikan. Dalam fungsi legislasi, *Mentee* memberikan penjelasan proses penyusunan suatu peraturan daerah. Penjelasan masih sangat umum tidak muncul penjelasan rinci misalnya proses awal penyusunan naskah akademik atau bagaimana konsultasi publik dijalankan.

Dalam hal fungsi pengawasan, *Mentee* menyatakan bahwa fungsi ini dijalankan untuk mengawasi pelaksanaan suatu program dengan fokus penggunaan anggaran, sesuai mekanisme yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi ini, selain dengan rapat teknis dengan SKPD terkait setelah menganalisis laporan, *Mentee* juga menadakan kunjungan lapangan sebagai bagian proses verifikasi.

Untuk fungsi penganggaran, *Mentee* lebih banyak menjelaskan darimana pendapatan pemerintah. Penjelasan yang muncul masih sangat umum, belum memerinci proses lengkap alur penanggaran.

Dalam hal upaya menyerap aspirasi masyarakat, *Mentee* menyadari pentingnya kunjungan lapangan ke konstituen untuk menyerap aspirasi. Dialog dengan konstituen sudah dilakukan baik dalam konteks reses maupun non-reses, tetapi masih belum terstruktur agenda kunjungan dan

bagaimana masukan dari kunjungan ke kelompok-kelompok konstituen menjadi suatu pencapaian substantif bagi masyarakat.

April 2015	Januari 2016
<p>“ya kita tetap hearing lah, kita mendengar aspirasi masyarakat konstituen kita. kita turun lapangan, mendengar keluhan apa yang mereka sampaikan. Tetapi kita sarankan kepada mereka bahwa kita nggak bisa melebihi plafon anggaran yang sudah ada. Kalau memang kota ini masih defisit kita mau mengambil uang darimana, kita kan bukan eksekutor.”</p>	<p>“Saya sering melakukan kunjungan lapangan ke konstituen untuk menyerap aspirasi. Dialog dengan konstituen sudah dilakukan baik dalam konteks reses maupun non-reses”.</p>

- **Relasi dengan Media**

Sama halnya dengan aspek lain, *Mentee* belum mengindikasikan suatu perubahan yang signifikan walapun sebenarnya *Mentee* menyadari peran media. Hal ini tampak dari pernyataan *Mentee* yang berpendapat bahwa pentingnya media selain untuk menyampaikan informasi kegiatan-kegiatan parlemen kepada masyarakat belum dilihat media juga dapat berfungsi sebagai kontrol yaitu melalui pemberitaan tentang keluhan kelompok masyarakat. Dalam prakteknya *Mentee* belum memiliki pendekatan khusus dan masih sangat terbatas tipe media yang digunakan.

April 2015	Januari 2016
<p>“...disini kan ada pers yang setiap saat kesini, wartawan kesini, kita ngomong disini. Mereka kan tugas disini, mereka sering berkoordinasi sama kita. Semua media kan tidak tertutup kemungkinan. Siwa lima, Ambon Express, Galang, Suara Maluku dan sebagainya, kalau memang ada berita ya mereka mau tanya kita ya silahkan. Buat kita cukup aja sama Koran”.</p>	<p>“.....memang penting untuk menyampaikan informasi kegiatan-kegiatan parlemen kepada masyarakat belum dilihat media juga dapat berfungsi sebagai kontrol yaitu melalui pemberitaan tentang keluhan kelompok masyarakat.”</p>

- **Pencapaian dalam Konteks 5 Tema Utama MAMPU**

Secara umum *Mentee* masih memandang bahwa pemberdayaan perempuan bukan sebuah fokus yang harus dilaksanakan oleh semua pihak, fokus yang menembus batas komisi dan lembaga, *Mentee* masih berpikir bahwa fokus ini adalah tanggung jawab lembaga tertentu. *Mentee* dalam diskusi lebih fokus pada penganggaran maka diskusi tematik MAMPU ini selalu mengarah pada analisa APBD.

April 2015	Januari 2016
<p><u>Konteks Pemberdayaan Perempuan secara Umum</u> “untuk penguatan perempuan, kita pilah</p>	<p><u>Konteks Pemberdayaan Perempuan secara Umum</u> “... saya pikir itu harusnya tanggung</p>

<i>dulu, kan SKPD-SKPD mana yang mengusulkan anggaran itu kita lihat perempuannya itu masuk dimana, SKPD mana. Ya kalau di SKPD itu ada prioritas kesitu ya kita tetap menyetujui.”</i>	<i>jawab komisi yang memang membidangi pemberdayaan perempuan”.</i>
---	---

- *Integrasi program dengan pihak lain*

Dalam studi akhir ini, *Mentee* hanya menjelaskan selama ini kerjasama dengan pihak lain dilakukan sesuai dengan koridor yang berlaku. Tidak ada penjelasan lebih lanjut dari *Mentee* mengenai pengertian sesuai dengan koridor yang berlaku.

April 2015	Januari 2016
<i>“...saya kira tidak menutup kemungkinan itu semua kerjasama, tetapi kita diatur dengan tatib. Kita kan ada tatib yang mengatur, jadi menyangkut hal-hal yang bisa kita ngomong ya kita ngomong. Tugas kita nggak bisa keluar dari itu. Kita punya pimpinan-pimpinan, terserah kalau seumpama ada persetujuan pimpinan untuk kerjasama saya kira tidak ada persoalan untuk kerjasama itu.”</i>	<i>“...betul memang harus bekerja sama dengan semua pihak, tetapi saya selama ini ya...dengan mitra komisi saja”.</i>

2. Perspektif Perwakilan SKPD

Potret kinerja APP/APL juga dijarah dari opini mitra kerja mereka di lingkungan eksekutif. Dengan menggunakan metode wawancara, dalam tahapan ini melibatkan 3 staf pemerintah daerah Kota Ambon sebagai narasumber yaitu Elkyopas Silooy (Kepala Sekwan DPRD Kota Ambon), Dessy Noijs (Kepala Bidang BPPMD - Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat Desa) dan dr. Yusda Tuharea (Kabid Pemberantasan dan Penyebaran Penyakit Lingkungan, Dinas Kesehatan). Dalam wawancara, pertanyaan diarahkan ke dalam 2 kelompok besar seperti diuraikan di bawah ini.

- *Komunikasi Politik*

Interaksi antara narasumber dengan APP/APL lebih sering dalam kegiatan-kegiatan dengan tujuan khusus bukan dalam kegiatan formal yang rutin dilaksanakan, seperti perencanaan pembangunan (Musrenbang). Narasumber juga menyatakan bahwa beberapa kali dilibatkan dalam kunjungan kerja baik ke daerah maupun nasional.

Namun demikian, narasumber juga melihat perubahan pola interaksi antara anggota DPRD dengan konstituennya. Yang tadinya konstituen lebih banyak menggunakan cara-cara demonstrasi, belakangan lebih banyak menggunakan cara berdialog.

April 2015	Januari 2016
<p>“saya pernah 2 kali bersama-sama dengan mereka, berkunjung ke, ketika itu kita membicarakan peningkatan kapasitas di kabupaten Maluku Tengah, kebetulan di Paso disini, di hotel Natsepa. Sama sekali kita bersama-sama ke kementerian keuangan.” (Elkyopas Silooy)</p>	<p>“dengan konstituen sendiri, cara komunikasi baru mulai dilakukan. Yang sebelumnya dilakukan dengan cara demonstrasi, saat ini kelompok-kelompok masyarakat menempuh cara-cara dialog. Dan ini menurut pengamatan saya adalah perubahan yang luarbiasa.” (Elkyopas Silooy)</p>

- **Tata Kelola Aspirasi**

Dalam wawancara mengemuka bahwa masyarakat secara umum belum memandang fungsi-fungsi anggota dewan secara lengkap. Masyarakat lebih memandang pada proyek-proyek fisik seperti infrastruktur dan program-program yang terlihat langsung, seperti program bantuan untuk masyarakat.

Narasumber menyatakan bahwa sebaiknya APP/APL lebih aktif dan lebih intensif lagi melakukan kunjungan kerja ke kelompok-kelompok konstituen untuk mendapatkan masukan dari masyarakat. Info mengenai saluran aspirasi mana saja yang bisa digunakan juga dirasakan oleh narasumber masih belum tersebar luas. Hal ini berdampak pada pemahaman masyarakat terhadap parlemen, tidak banyak berubah.

April 2015	Januari 2016
<p>“kalau mengenai fungsinya mereka mungkin masih kurang dalam hal untuk lebih dekat lagi ke masyarakat, untuk lebih banyak lagi menyerap aspirasi masyarakat. Mungkin mereka karena kelihatannya waktu mereka lebih banyak di kantor atau kunjungan-kunjungan justru ke luar daerah yang nggak perlu. Justru yang kembali ke basisnya untuk menyerap aspirasi lalu berusaha bagaimana cari way out untuk pemecahannya.” (dr. Robert Chandra)</p>	<p>“selama ini komunikasi antara anggota dewan dengan masyarakat belum dilakukan secara intensif. Sebagian malah saya melihat, masyarakat masih menjadi objek saja. Saat mau pemilihan umum, baru biasanya komunikasi berjalan intens. Ini yang saya lihat di tempat saya-Maluku Tengah .” (dr. Yusda Tuharea)</p>

3. Perspektif Kelompok Konstituen

Potret kinerja APP/APL juga dijaring dari opini kelompok konstituen yaitu kelompok masyarakat yang harus mereka wakili kepentingannya. Dengan menggunakan metode wawancara, dalam tahapan ini melibatkan 5 orang warga masyarakat secara umum, yaitu Liena Silooy (KK.Panggayo, Kec.Nusaniwe), Claudia Fransisca Parera (Ketua KK.Negri Hatalai, Kec.Leitimur Selatan), Angel Tentua (KK.Banguala), Femmy Patiasina (KK.Gosepa, Kec.Sirimau) dan Simatauw Fredrik (Ketua KK.Inabala-Lateri, Kec.Teluk Ambon). Selain itu, termasuk dalam kelompok adalah wawanara dengan 2 orang perwakilan dari LSM, yaitu Piet Wairissal (Direktur LPP Ambon) dan Justus Pattipawae (Direktur Institut Tifa Damai Maluku). Analisis hasil wawancara dikelompokkan ke dalam 2 tema seperti diuraikan di bawah ini.

- *Komunikasi Politik*

Terdapat beberapa nama mitra MAMPU (APL) yang disebutkan para narasumber ketika diajukan pertanyaan terbuka siapa nama anggota DPRD yang mereka kenal. Nama-nama tersebut adalah Mourits Librecht Tamaela, Elly Toisutta, Muriany Dominggus, Chistiano Laturiuw, Taha Abubakar, Juliana Pattipeilohy, Marcus Pattiapon, Agustinus Markus Kailuhu.

Para narasumber menyatakan bahwa opini mereka sangat beragam terkait pengetahuan kinerja APP/APL. Kedalaman pengetahuan sangat dipengaruhi oleh intensitas pertemuan dan keaktifan nara sumber di kelompok konstituen. Ada narasumber yang sudah terlibat dalam advokasi kebijakan sebagai wakil masyarakat namun ada juga kelompok konstituen yang belum banyak berinteraksi dengan APP/APL.

Dalam proses wawancara, 3 dari 6 narasumber menyatakan sudah pernah pernah dihubungi oleh APP/APL baik langsung maupun tidak langsung untuk hadir atau terlibat dalam pertemuan dialogis. Misalnya, yang dilakukan oleh **Claudia Fransisca Parera, Liena Silooy dan Angel Tentua**. Mereka sudah terbiasa berkomunikasi dengan medium telepon dan sms maupun bertemu langsung. Terutama untuk membicarakan persoalan yang ada di kelompok konstituen mereka, misalnya persoalan pengelolaan dana BOS. Termasuk juga memastikan akses anggota kelompok konstituen terhadap program-program pemberdayaan dari dinas-dinas terkait.

Narasumber dari kelompok konstituen merasa mendapatkan pengalaman yang sangat bermanfaat atas dampingan ARIKA MAHINA, sehingga mampu melakukan dialog tidak hanya dengan anggota DPRD di daerah pemilihan, tetapi juga dengan SKPD.

April 2015	Januari 2016
“Program kerja mereka kan saya tidak tahu dari berjalan itu saya belum pernah dengar ada program anggota dewan itu turun ke dapil - dapil.”(Simatauw Fredrik)	“Melalui program MAMPU, hubungan kami dengan anggota DPRD menjadi lebih terbuka. Kami jadi bisa langsung menghubungi anggota DPRD, via telp, sms, terhadap hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang kami hadapi.”(Claudia Fransisca Parera)

- *Tata Kelola Aspirasi*

Para narasumber menyatakan bahwa APP/APL sudah memulai upaya menjangkau masukan/aspirasi dari masyarakat dan tidak terbatas pada saat reses saja. Mulai terlihat hasil konkrit dari upaya komunikasi dengan anggota DPRD. Dari 5 fokus program MAMPU, yang menjadi program konkrit dan mulai dirasakan masyarakat adalah adanya program-program dana bergulir dan penguatan ekonomi kelompok-kelompok perempuan dan masyarakat miskin. Dalam proses wawancara, program-program yang sering disebutkan narasumber adalah program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Program Dana Bergulir.

Level dialog dengan anggota DPRD dan SKPD pada kelompok konstituen, menurut pengakuan narasumber, dari kelompok konstituen adalah berkat dampingan dan fasilitasi ARIKA MAHINA. Sehingga pengurus Kelompok Konstituen mengetahui harus menghubungi siapa di SKPD dan APP/APL jika mendapatkan laporan mengenai masalah yang dihadapi anggota kelompok konstituen.

Dari sisi hasil kebijakan inisiatif anggota DPRD, Peraturan Daerah Perlindungan HIV/Aids dan Peraturan Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Kekerasan rumah tangga adalah contoh yang bisa dilihat dari hasil interaksi antara DPRD dan kelompok-kelompok masyarakat sipil.

Hal lain yang disebutkan oleh semua narasumber, terutama dari NGO yaitu adanya kekhawatiran apakah APP/APL akan terus melakukan komunikasi secara intensif tanpa support program. Meski sebagian narasumber melihat, proses nya masih terlalu awal untuk menilai proses interaksi yang terjadi.

April 2015	Januari 2016
<p><i>"...nah kita berharap dari teman-teman champion di legislative itu bisa sosialisasi ke teman-teman yang lain, memvirus teman-teman yang lain terkait isu Mampu itu, nah tetapi kita juga mengundang teman-teman ini yang punya kapasitas dan posisi tawar yang tinggi di fraksi mereka atau partai mereka seperti itu. Ya paling sedikit posisi mereka itu sekarang ketua fraksi di DPRD kota. (Justus Pattipawae)</i></p>	<p><i>"...memang ini masih terlalu dini untuk melihat pola relasi yang ada antara anggota DPRD dan konstituennya. Saya kira embrio nya sudah ada, tetapi terlalu awal untuk dinilai. Jadi prosesnya masih memperkuat saling percaya satu sama lain (Piet Wairissal)</i></p>

4. Perspektif Kelompok Media

Potret kinerja APP/APL juga dijangkit dari opini kelompok jurnalis untuk melengkapi perspektif dari para pegiat media massa. Dengan menggunakan metode wawancara, dalam tahapan ini melibatkan 2 orang sebagai narasumber, yaitu Embong Salampessy (Harian Suara Maluku/Fotografer Antara) dan Saswaty Matakana (Majalah Kartini). Dalam wawancara, pertanyaan dapat dikelompokkan ke dalam 2 kelompok besar seperti diuraikan di bawah ini.

- *Komunikasi Politik*

Pada dasarnya semua narasumber berpendapat bahwa kinerja APP/APL terutama dalam hal pemanfaatan media massa saat ini memang lebih terlihat, meski terdapat pembagian peran antara pimpinan DPRD, pimpinan Komisi dan Pimpinan Fraksi. Sehingga pada umumnya anggota DPRD relatif tidak mempunyai akses ke media.

Komunikasi dengan konstituen saat ini boleh dikatakan lebih baik. Anggota DPRD lebih terbuka kepada konstituennya yang sebelumnya seolah ada jarak. Selain itu, model komunikasi masih lebih variatif, tidak hanya mengandalkan pemberitaan media cetak (*press realease*). Saat ini kelompok

konstituen malah bisa langsung berhubungan dengan APP/APL dari dapil mereka masing-masing.

April 2015	Januari 2016
<p>“...penguatan kapasitas mereka untuk lebih memahami lagi fungsi-fungsi dan tugas yang harus dijalankan. Selain itu juga diperkuat dengan kapasitas public speaking. Karena mereka kalau di diskusi itu terkesan nggak berani ngomong, takut salah ngomong atau apa gitu ya (Embong Salampessy)</p>	<p>“....selama ini sepanjang yang saya catat, isu-isu pelayanan dasar yang lebih banyak di usung oleh kelompok konstituen saat bertemu dan berdiskusi dengan APP-APL. Demikian juga isu-isu dalam program MAMPU.” (Embong Salampessy)</p>

- **Tata Kelola Aspirasi**

Narasumber menyatakan bahwa saat ini meski sudah mulai ada hasil konkrit, namun secara umum komitmen anggota dewan dalam menjalankan aspirasi masyarakat harus terus diupayakan oleh berbagai pihak, salah satunya adalah media.. Narasumber menyadari adanya banyak faktor yang mempengaruhi, salah satu yang nampak terlihat adalah mekanisme dan sistem di dalam partai.

Narasumber juga menyatakan bahwa sejauh ini APP/APL komitmen politiknya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat belum 100%. Seringkali kebijakan lahir karena dorongan kelompok masyarakat di luar parlemen.

Hal lain yang dirasakan oleh narasumber adalah kurangnya database tersentral terkait dengan peraturan daerah yang pernah di sahkan oleh DPRD.

April 2015	Januari 2016
<p>“...butuh koordinasi juga dengan mungkin forum media ya khusus kita spesifikasi ke program Mampu ya kalau misalnya MOU yang akan terjalin nanti dengan DPRD kota kedepan saya pikir kalau untuk khusus masalah-masalah 5 isu Mampu ini ada baiknya juga teman-teman forum media juga dilibatkan, ketika mereka melakukan pengawasan. Nah secara tidak langsung kita bisa mengukur capaian atau tingkat keberhasilan program Mampu itu di kota ambon itu sudah berapa besar” (Saswaty Matakena)</p>	<p>“...Saya pernah mengusulkan kepada DPRD agar membuat semacam media centre yang berisi peraturan-peraturan daerah yang sudah disahkan untuk 5 tahun kemarin. Sehingga masyarakat jadi mengetahui perda apa saja yang sudah disahkan oleh DPRD. Selama ini kan seolah-olah setelah mengesahkan, anggota DPRD lupa. Sampai mana implementasi terhadap perda tersebut, kita tidak tahu. Dengan adanya database ini akan mempermudah kontrol terhadap perda usulan masyarakat agar tidak bertabrakan dengan yang sudah ada. Demikian juga ketika mau melakukan revisi, semua informasi sudah ada di website yang mudah diakses, akan lebih mempermudah partisipasi ” (Saswaty Matakena)</p>

Bab IV. Catatan Akhir

1. Kesimpulan

- a) Saat ini seluruh APP/APL mitra telah memiliki pemahaman dasar yang memadai. Untuk beberapa APP/APL mitra dengan perubahan signifikan (tabel hal. iv), telah memiliki inisiatif individu untuk melakukan inovasi di luar mandat partai. Perubahan ini tampak terutama dari peningkatan baik dari sisi frekuensi maupun kualitas dalam berhubungan dengan konstituen dan mitra strategis lainnya (fungsi representasi) serta kemampuan dalam melakukan analisis anggaran. Untuk APP/APL pimpinan dewan maupun komisi peningkatan kualitas juga tampak dari kontribusinya dalam pansus (fungsi legislasi) dan sisi pengawasan ketika melakukan diskusi teknis dengan mitra SKPD.
- b) Perubahan signifikan yang muncul di beberapa APP/APL (tabel hal. iv) pada bagaimana para *Mentee* menjalankan fungsi sebagai anggota DPRD. Misalnya APP/APL mulai menjalankan fungsi legislasinya dengan mengusulkan perda inisiatif dimana dalam periode pelaksanaan program Mentorship ini, ada 2 perda yang telah dihasilkan dan ditetapkan yaitu Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV AIDS dan Perda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (masih dalam proses verifikasi di provinsi Maluku).
- c) Perubahan yang signifikan juga terjadi pada tema utama MAMPU dimana kedua perda yang telah ditetapkan mengatur mengenai ***kesehatan reproduksi*** dan mengatasi ***kekerasan terhadap perempuan***.
- d) Untuk sebagian *Mentee* lainnya (kurang lebih dari 50%) dimana perubahan belum terlalu signifikan tampak bahwa hal ini dimungkinkan terjadi karena memiliki tantangan dalam menegosiasikan agenda komisi maupun parpol yang bersangkutan. Hal lain yang menyebabkan indikasi ini muncul karena
 - Periode dan metode pengamatan atau pengambilan data yang relatif singkat dan sederhana yaitu kurang lebih 2 jam wawancara untuk setiap APP/APL untuk program yang baru dilaksanakan 8 bulan. Relatif singkat bila dibandingkan dengan kompleksitas materi yang harus dijalankan, mulai dari fungsi anggota dewan sampai dengan gender dan kemiskinan.
 - Metode pendampingan yang dijalankan sangat variatif di masing-masing *Mentee* mulai dari hanya melalui SMS sampai dengan diskusi secara langsung.
 - Dalam kegiatan *mentorship* yang dilakukan telah sampai menyusun rencana kerja strategis setiap APP/APL mitra program terutama dalam konteks 5 tema utama program MAMPU, namun hal ini masih perlu ditingkatkan lagi. Namun perubahan mulai terlihat dalam fungsi legislasi yang sudah sampai pada pendampingan dalam melakukan asesmen kebutuhan masyarakat sebagai dasar landasan sosiologi dan filosofi, penyusunan dan review naskah akademik dan bagaimana diskusi publik dijalankan. Namun hal ini hanya dilakukan oleh APP/APL pada komisi yang mendorong 2 perda yang telah ditetapkan. Sedangkan Fungsi pengawasan belum sampai pada pertemuan verifikasi multi-pihak dan bagaimana konsekuensinya dari sisi kebijakan. Namun fungsi pengawasan

- mulai dijalankan ketika APP/APL mendapatkan informasi, masukan dan aspirasi masyarakat terhadap sebuah masalah yang terjadi dan hal ini baru bersifat kasuistik. Jadi Fungsi Pengawasan belum dilakukan secara terstruktur dan komprehensif,
- Sebagian besar APP/APL sudah paham fungsi idealnya sebagai anggota dewan tetapi tidak semua mengerti bagaimana menyusun rencana kegiatan nyata dalam rangka menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, pengawasan maupun representasi.
- e) Materi dalam silabus belum semua dikenalkan kepada para *Mentee* secara intensif terutama materi-materi lintas sektoral misalnya gender dan kemiskinan. Namun beberapa *Mentee* telah mengetahui beberapa isu terkait perempuan seperti isu gender dan tema MAMPU.
 - f) Seperti halnya di Kabupaten Bone sebagai area *pilot project*, terdapat materi baru yang strategis dan berpotensi untuk dikembangkan sebagai pijakan agar peran APP/APL lebih konkrit baik dari sisi fungsi formal keparlemennannya maupun hubungan dengan konstituen serta media yaitu implementasi UU Desa.
 - g) Sebagian besar *Mentee* telah memiliki persepektif partisipatif yang menganggap pentingnya pelibatan masyarakat dan perempuan dalam pembangunan, untuk didengar dan disuarakan. Hal ini ditunjukkan dengan lebih intensnya *Mentee* membangun hubungan dengan masyarakat khususnya konstituennya, baik melalui pertemuan formal seperti reses maupun insiatif pribadi untuk bertemu dengan masyarakat.
 - h) Secara khusus untuk APP, sudah terlihat kemampuan *public speaking* dan kepercayaan diri untuk berbicara di depan umum maupun dalam sidang pembahasan di DPRD, sehingga hal yang masih dapat ditingkatkan adalah penyusunan rencana yang terstruktur dan rutin dijalankan untuk berinteraksi dengan media (*press*) sebagai bagian dari strategi komunikasi dan publikasi.
 - i) Peran Yayasan Arika Mahina sebagai mitra lembaga lokal sangat strategis terutama dalam konteks pendampingan *Mentee* secara intensif. Di beberapa isu tampak sangat membantu APP/APL misalnya dalam relasi dengan konstituen dan analisis anggaran.

2. Rekomendasi

- a) Program *mentorship* ini perlu dilanjutkan mengingat beberapa perubahan awal yang telah dicapai dapat lebih ditingkatkan.
- b) Penguatan kapasitas tidak hanya untuk APP/APL tetapi juga staf ahli (*think tank*) formal/resmi sebagai pendamping dalam melaksanakan tugas kesehariannya.
- c) Perlu penyesuaian metode dan periode pengukuran efektivitas program melalui analisa perubahan (*most-significant change*) secara lebih komprehensif.
- d) Pelatihan *public speaking* untuk anggota dewan sampai dengan menyusun rencana kerja sebagai bagian dari strategi komunikasi dan publikasi.
- e) Perlu penyesuaian metode dan teknik pendampingan yang sejalan dengan silabus disesuaikan dengan isu terkini dan kebutuhan praktis APP/APL mitra misalnya dalam konteks pelaksanaan UU No.6/2014 tentang Desa.
- f) Sebaiknya intensitas dan metode pendampingan memiliki standar yang lebih terukur untuk masing-masing *Mentee* di setiap materi sesuai silabus yang telah disusun di awal program.

- g) Perlu dipertimbangkan untuk pengembangan program *mentorship* dengan pendekatan kelembagaan partai mengingat tantangan untuk berinovasi datang dari garis hierarkhis kepartaian.
- h) Penyusunan konsep, strategi dan jadwal kerja berdasar subjek/topik setiap APP/APL mitra baik dalam kerangka fungsi formal keparlemenan, maupun dalam hal berhubungan dengan kelompok konstituen atau mitra strategis lainnya.
- i) Pengenalan kerangka logika pencapaian progam kerja secara terukur baik dari sisi waktu, kelompok sasaran maupun target pencapaian secara substantif.
- j) Menggunakan jalur media secara kreatif dimana tidak terbatas media *mainstream*. Misalnya dengan kunjungan individu APP/APL ke kantor media dengan agenda mendiskusikan isu tetentu.
- k) Optimalisasi kunjungan ke daerah pilihan melalui pola MSF (*multi stakeholder forum*) dimana melibatkan LSM, SKPD, akademisi serta kelompok masyarakat pada umumnya dengan tetap melibatkan jurnalis profesional.
- l) Temuan dan rekomendasi dalam baseline hendaknya melengkapi kegiatan identifikasi awal (*capacity building need assessment*) sebagai masukan dalam melaksanakan kegiatan mentorship sehingga memenuhi kebutuhan nyata APP/APL mitra program dalam melaksanakan fungsinya.
- m) Program *mentorship* dapat lebih optimal bila dalam pelaksanaannya dapat mengintegrasikan peran panel ahli yang memberikan materi utama dan lembaga mitra (misal: LPP Bone) sebagai pendamping APP/APL untuk mempraktekkannya dalam tugas keseharian.

Lampiran

Klasifikasi Pertanyaan K.A.P (Knowledge, Attitude and Practices)

Fokus	Pertanyaan	Kategori		
Mengidentifikasi pemahaman, persepsi dan praktek keparlemenan	Menurut pemahaman anda, apa yang dimaksud dengan “fungsi parlemen, prinsip parlemen dan konstituen”?	K		
	Menurut pemahaman anda, hal apa saja yang sebaiknya dilakukan oleh anggota parlemen agar mampu menjalankan fungsinya?	K		
	Menurut anda, kapan seorang anggota parlemen dapat dikatakan sukses?		A	
	Menurut anda, faktor-faktor kunci apa sajakah yang menjadikan seorang anggota parlemen sukses?		A	
	Apakah anda merasa perlu mengembangkan kapasitas diri sebagai anggota parlemen? Alasannya?		A	
	Menurut anda, bagaimana sebaiknya seorang anggota parlemen berinteraksi dengan konstituennya?		A	
	Pengembangan diri apa sajakah yang sudah anda lakukan?			P
	Hambatan apa yang anda hadapi dalam melakukan pengembangan diri?			P
Relasi dengan media dalam menjalankan fungsi parlemen	Seberapa penting menurut anda membangun relasi dengan media sebagai anggota parlemen?		A	
	Menurut anda kriteria media seperti apakah yang strategis untuk mendukung fungsi sebagai anggota parlemen?	K		
	Bagaimana saat ini anda membina relasi dengan media?			P

	Media apa saja yang anda gunakan saat ini dalam menjalankan fungsi parlemen?			P
Pencapaian APP/APL dalam konteks 5 tema utama MAMPU	Secara ideal , hal apa saja yang sebaiknya anda lakukan terkait dengan isu utama program MAMPU?	K		
	Pada kenyataannya , hal apa saja yang telah anda lakukan terkait isu utama program MAMPU?			P
	Dengan berdasarkan kepada apa yang sudah dilakukan, apakah hasilnya sudah dinilai optimal (sesuai dengan harapan) Faktor apa yang menyebabkan kurang optimalnya hal diatas?			P
	Faktor apa sajakah yang menyebabkan ada beberapa hal yang dianggap ideal untuk dilakukan, namun belum dilakukan?			P
Cross sharing dan integrasi program diantara para APP/APL (yang sudah berlangsung dan/atau peluang untuk terjadinya hal tersebut)	Apakah anda melakukan kerjasama dengan anggota parlemen yang lain?			P
	Bagi yang melakukan kerjasama <ul style="list-style-type: none"> ▪ Motivasi atau manfaat yang ingin didapatkan? ▪ Bentuk kerjasama yang dilakukan? ▪ Faktor apa sajakah yang menyebabkan kurang optimalnya manfaat yang didapatkan? ▪ Hambatan melakukan kerjasama dengan APP/APL lain? 			P
	Bagi yang <u>belum</u> melakukan kerjasama <ul style="list-style-type: none"> ▪ Faktor apa kah yang menyebabkan tidak/belum dilakukannya kerjasama dengan APP/APL yang lain? ▪ Persepsi terhadap pentingnya dilakukan kerjasama dengan APP/APL lain, apakah kerjasama dengan APP/APL lain perlu/penting untuk dilakukan? Alasan ▪ Apakah ada peluang untuk melakukan kerjasama dengan APP/APL lain ke depan? 			P

Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI)

Jl. H.A.Mappanyukki No 32, Makassar 90125

T. (62-411) 832228 / 833383, F. (62-411) 852416

www.bakti.or.id